

**Penghentian *Drug Enforcement Administration* (DEA) Di Bolivia**

**Pada Tahun 2009**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**RAFI AFRIZAL THORIQ  
19323042**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

# **Penghentian *Drug Enforcement Administration* (DEA) Di Bolivia**

**Pada Tahun 2009**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**RAFI AFRIZAL THORIQ**

**19323042**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**Penghentian *Drug Enforcement Administration* (DEA) Di Bolivia**

**Pada Tahun 2009**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

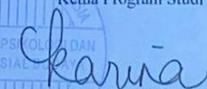
Pada Tanggal 24 Agustus 2023



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

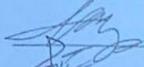
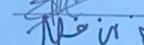
Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.


## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 16 Agustus 2023*



---

*Rafi Afrizal Thoriq*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penelitian ini saya persembahkan untuk :

### **Bapak Asy'ari Fauzen, Ibu Ari Lestari dan Nenek Hj. Sumiyati Moch Dhori**

Terima kasih atas semua bentuk doa, dedikasi, perjuangan, kesabaran dan perhatian yang selalu diberikan kepada saya sewaktu proses belajar dan pengerjaan skripsi ini. Semoga semua hal yang sudah saya berikan dapat menjadi manfaat bagi saya dan orang banyak.

### **Adik dan Seluruh Keluarga Besar**

Terima kasih atas semua bentuk dukungan dan motivasi mereka dengan cara menanyakan “*Sudah sampai mana skripsinya dan kapan selesai*” yang menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal baik selalu menyertai kalian.

### **Muhammad Fadhil Hidayat Samsir, S.Hub.Int. dan Muhammad Ilham Hafidzillah, S.Hub.Int**

Terima kasih atas semua bentuk dukungan, bantuannya dan hiburannya selama proses pengerjaan seperti “*yok kerjain yok dan selesaiin bareng yok*” yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal baik selalu menyertai kalian.

### **Shidky Aygarini. S.AK.**

Terima kasih atas segala bentuk kebaikan, dukungan, motivasi dan supportnya. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini salah satunya karenamu. Saya berharap kedepannya kita selalu bersama dan dapat menyelesaikan tantangan-tantangan lain.  
Semoga hal baik selalu menyertaimu.

## **HALAMAN MOTTO**

“ Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat pedih.”

**(QS Ibrahim: 7)**

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

**(Q.S Al-Baqarah: 153)**

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
Abstrak.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara .....	12
1.8 Metode Penelitian .....	12
1.8.1 Jenis Penelitian .....	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.8.4 Proses Penelitian .....	13
1.9 Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II .....	16
TANAMAN KOKA SEBAGAI KEBUTUHAN BAGI BOLIVIA DAN PERMASALAHAN BAGI AMERIKA SERIKAT .....	16
2.1. Tanaman Koka Sebagai Kebutuhan Masyarakat Bolivia.....	16
2.2 Kerjasama sebagai upaya Amerika Serikat untuk masuk ke Bolivia dan mempengaruhi kebijakan dari Evo Morales.....	19
2.3 DEA sebagai alat intervensi oleh Amerika Serikat terhadap Bolivia .....	23
BAB III.....	28
3.1 Pengaruh Politik Domestik.....	28
3.1.2 Kondisi sosial saat keberadaan DEA .....	32
3.2 Ekonomi dan Militer.....	36

3.2.1	<i>Dampak terhadap Keamanan Nasional pada saat DEA</i> .....	36
3.2.2	<i>Dampak terhadap Perekonomian Masyarakat</i> .....	40
3.3	<b>Konteks Hubungan Internasional</b> .....	43
3.3.1	<i>Hubungan Bolivia dan Amerika Serikat dalam Konteks DEA</i> .....	43
3.4	<b>Evo Morales Dan DEA</b> .....	45
<b>BAB IV</b>	.....	<b>48</b>
4.1	<b>Kesimpulan</b> .....	48
4.2	<b>Rekomendasi</b> .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>54</b>

## DAFTAR SINGKATAN

DEA	: <i>Drug Enforcement Administration</i>
FTTA	: <i>Free Trade Area Of Americas</i>
SAP	: <i>Structural Adjustment Programme</i>
UMOPAR	: <i>Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
BORTAC	: <i>Border Patrol Tactical Unit</i>
YPFB	: <i>Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
MAS	: <i>Movement for Socialism</i>
ALBA	: <i>Bolivarian Alliance for the Peoples of Our Americas</i>
OAS	: <i>Organization of American States</i>
AS	: <i>Amerika Serikat</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>

## Abstrak

Tanaman koka merupakan tanaman suci yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Bolivia selama ratusan tahun hingga saat ini, seiring berjalannya waktu pemanfaatannya berkembang menjadi salah satu komoditas yang dapat menunjang perekonomian Bolivia. Bagi Amerika Serikat tanaman ini memberikan efek berbahaya, karena daun koka adalah bahan pembuatan kokain, maka dari itu Amerika Serikat berkomitmen untuk memerangi obat-obatan terlarang sekaligus penyebarannya dengan membuat kebijakan *War on Drugs*, Amerika Serikat membentuk tim anti narkotika DEA, namun keberadaannya ini dianggap memberikan efek negatif terhadap keamanan Bolivia. Teori decision making digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa mengapa Evo Morales membuat keputusan untuk mengusir DEA dari Bolivia. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Evo Morales yaitu: keadaan politik domestik, kondisi militer, kondisi ekonomi dan hubungan internasional negara tersebut. Argumen sementara dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh DEA justru memberikan kerugian yang cukup besar bagi negara Bolivia. Faktor domestik seperti tekanan dari partai oposisinya untuk menggulingkan Evo Morales, adanya DEA justru membuat masyarakat menjadi miskin, bahkan DEA melakukan Spionase politik, dan negara tetangga seperti Venezuela bahkan mengusir DEA karena efek adanya DEA. Oleh karena faktor-faktor tersebut membuat Evo Morales akhirnya mengusir DEA dari Bolivia, karena dinilai memberikan dampak negatif bagi Bolivia.

**Kata Kunci :** Bolivia, *Drug Enforcement Administration*, Evo Morales.

## Abstract

The coca plant is a sacred plant that has been an integral part of Bolivian culture for hundreds of years until today, over time its utilization has developed into one of the commodities that can support the Bolivian economy. For the United States, this plant has a dangerous effect, because coca leaves are ingredients for cocaine, therefore the United States is committed to fighting illegal drugs as well as their spread by making a War on Drugs policy, the United States forms a DEA anti-narcotics team, but its existence is considered had a negative effect on Bolivian security. Decision making theory is used in this study to analyze why Evo Morales made the decision to expel the DEA from Bolivia. There are four factors that influence Evo Morales' decision making, namely: domestic political conditions, military conditions, economic conditions and the country's international relations. The temporary argument from the many violations committed by the DEA actually resulted in a considerable loss for the Bolivian state. Domestic factors such as pressure from the opposition party to overthrow Evo Morales, the existence of the DEA actually makes people poor, the DEA even conducts political espionage, and neighboring countries like Venezuela even expel the DEA because of the effects of the DEA. Because of these factors, Evo Morales finally expelled the DEA from Bolivia, because it was considered to have a negative impact on Bolivia..

**Keyword :** Bolivia, *Drug Enforcement Administration*, Evo Morales

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Selama berabad-abad, masyarakat asli di Bolivia yang dikenal dengan nama Indian Aymara telah memanfaatkan tanaman koka dalam kehidupan sehari-harinya (Koops, 2009). Daun koka yang merupakan tanaman asli dari Amerika Selatan merupakan bahan mentah untuk produksi kokain. Bagi penduduk asli Bolivia, koka merupakan tanaman suci yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka selama ratusan tahun (Reisinger, 2009). Masyarakat Bolivia juga menjadikan tanaman koka sebagai kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti menjadikan daun koka sebagai bahan pembuatan teh, berbagai bahan masakan makanan, sebagai bahan dalam proses pengobatan, bahkan tanaman koka juga menjadi salah satu kebutuhan dalam pengadaan acara-acara keagamaan sehingga dapat dipahami bahwa tanaman koka telah menjadi salah satu barang esensial bagi masyarakat Bolivia. Seiring berjalannya waktu, saat ini tanaman koka tak hanya menjadi salah satu pemenuh kebutuhan tapi telah menjadi salah satu komoditas terpenting bagi Bolivia.

Seiring berjalannya waktu, tanaman koka tak hanya sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatannya berkembang menjadi salah satu komoditas yang dapat menunjang ekonomi Bolivia saat itu dikarenakan nilai jualnya yang cukup tinggi. Selama awal 1980-an, ekonomi Bolivia mengalami

kejatuhan, sementara industri kokain yang ilegal berkembang pesat. Perdagangan obat-obatan, seperti yang terdapat didalam tanaman koka menjadi salah satu pelarian bagi pemerintah, termasuk kelompok bisnis dan ratusan ribu warga yang beputus asa dalam mencari pekerjaan dan pendapatan tunai. Selama setengah tahun 1980-an berjalan, produk domestik bruto Bolivia turun mencapai 20% hingga mengakibatkan pengangguran meningkat hingga berlipat ganda. Jatuhnya ekonomi di Bolivia sebagian besar disebabkan oleh anjloknya harga timah dunia, kesalahan dalam kepengurusan perusahaan pertambangan domestik yang cukup parah, dan tuntutan hutang luar negeri dari komunitas perbankan internasional (Haely, Bolivia and Cocaine : a developing country's dilemmas, 1988). Permintaan timah oleh AS dan Eropa Barat saat itu turun drastis sehingga harga terlalu rendah untuk menutupi biaya produksi. namun negara-negara ini bersedia membayar kokain dengan harga yang luar biasa, meskipun melalui saluran terlarang.

Menurut salah satu sumber, produksi kokain di tahun 1985 meningkat pesat dibanding tahun 1978. Awalnya produksi tanaman koka sebesar 35,000 ton pada tahun 1978, meningkat hingga 150,000 ton pada tahun 1985. Dari peningkatan tersebut, para petani dapat meraup keuntungan dari hasil produksi tanaman koka antara \$6000 hingga \$9000 untuk perhektarnya tanah yang ditanami tanaman koka (Haely, Bolivia and Cocaine: a developing country's dilemmas, 1988). Perluasan wilayah produksi tanaman koka ini tentunya memerlukan tambahan pekerja, sehingga para petani penghasil kokain di pedesaan mengajak para pemuda, pedagang, bahkan guru untuk ikut menanam koka. Pada pembagiannya, untuk pekerja yang kurang terampil mendapatkan upah sebesar \$6-8 per hari, sedangkan bagi pekerja yang terampil atau yang ditempatkan di laboratorium diberikan upah

sebesar \$10-12 per hari, Kondisi tersebut menyebabkan orang-orang yang berada di kota berpindah ke pedesaan dikarenakan pandangan terhadap para petani di pedesaan yang jauh lebih besar pendapatannya dibandingkan pekerjaan di kota. Ekspor kokain pada tahun 1987 hingga tahun 1989 sama besarnya dengan ekspor legal saat itu, bahkan dapat mempekerjakan 2-6% dari total populasi yang ada di Bolivia (Haely, *Bolivia and Cocaine: a developing country's dilemmas*, 1988).

Industri kokain secara tidak langsung telah berhasil meningkatkan lapangan kerja bagi petani tanaman kokain, pendapatan bagi orang miskin, devisa negara dan permintaan input industri seperti minyak tanah, aseton, asam sulfat, kertas toilet, dan sejenisnya. Hal ini secara tidak langsung, telah memperkuat demokrasi dengan meningkatkan pendapatan dan standar hidup, terutama selama masa-masa sulit (Franco & Godoy, 1992). Tidak dapat dipungkiri, Bolivia yang menjadi negara kedua termiskin di wilayah Amerika Latin tentu perlu memanfaatkan setiap instrumen maupun komponen yang mereka miliki dalam negara untuk mengeluarkan mereka dari kondisi tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan nilai jual tanaman koka.

Seiring berjalannya waktu, Bolivia yang terus mengalami pergantian pemimpin, hingga pada tahun 2005 Bolivia secara resmi menjadikan Evo Morales sebagai presiden pribumi pertama di Bolivia. Kenaikan dari Evo Morales tersebut seperti memberikan harapan yang baru untuk masyarakat asli Bolivia, bahkan masyarakatnya memberikan julukan *Apu Mallku* yang artinya Pemimpin Tertinggi (Linda C. Farthing , Benjamin H. Kohl, 2014). Kenaikan Evo Morales juga memberikan kesan baru mengingat pemimpin Bolivia sebelumnya berasal dari orang-orang kulit putih atau biasa disebut *White Mestizo* (Achsinn, 2020). Dalam

masa kepemimpinannya, Evo Morales telah menghadirkan beberapa kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat Bolivia, terutama bagi para petani koka disana. Pada Juni 2006, Evo Morales melakukan kebijakan *Land Reform*, dimana Evo Morales memperluas wilayah lahan pertanian koka, menjadikan daerah Yungas sebagai lahan pertanian koka, serta menyediakan tanah seluas seperlima lahan negara untuk para petani miskin di Bolivia. Tempat dari *Land Reform* tersebut berada di kota Santa Cruz yang dipilih karena merupakan wilayah pertanian dan pusat kekuasaan para pengusaha lahan di Bolivia, dan menyerahkan lahan seluas 3,1 hektar kepada 60 kelompok masyarakat indian di wilayah timur Bolivia (Samsul Ma'arif, 2013), untuk mendorong perekonomian petani, sekaligus membuka lapangan seluas-luasnya untuk masyarakat Bolivia. Hal ini juga sekaligus menjadi harapan sebagai pendorong perekonomian di Bolivia.

Kendati demikian, pada awal abad ke 20, ahli bidang kesehatan di Amerika Serikat, mulai menemukan beberapa efek negatif dari penggunaan kokain, seperti , kecanduan secara berkepanjangan, serangan jantung dan bahkan menyebabkan kematian, berdasarkan laporan dari Amerika Serikat, rata-rata orang meninggal karena efek kokain mencapai 5000 orang. Maka dari itu Amerika Serikat pada tahun 1922, menetapkan secara resmi bahwa kokain adalah obat yang berbahaya dan menjadikan kokain sebagai obat yang terlarang. Semenjak itu, Amerika Serikat berkomitmen untuk memerangi obat-obatan terlarang sekaligus penyebarannya dengan menciptakan kebijakan *War on Drugs*. Kebijakan ini tak hanya berlaku di Amerika Serikat, tapi juga diterapkan di wilayah Amerika Selatan, mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah dengan negara-negara penghasil tanaman koka terbesar di barat dan salah satunya ialah Bolivia. Salah satu bentuk penerapan

kebijakan *War on Drugs* di Bolivia ialah, Amerika Serikat membentuk tim anti narkotika atau *Drug Enforcement Administration* (DEA) pada tahun 1973 (administration, 2021), dengan tujuan untuk melawan penyebaran sekaligus pelarangan terhadap narkoba-narkoba yang tersebar, salah satunya yaitu kokain (Samuel, Kisah Sukses Bolivia Memerangi Narkoba, 2017). Namun, keberadaannya ini dianggap memberikan efek negatif terhadap keamanan negara Bolivia, salah satunya yaitu organisasi ini dianggap terlalu mencampuri urusan politik Bolivia, dan diisukan mempunyai rencana tersembunyi seperti adanya dugaan rencana untuk menggulingkan Evo Morales. Perlu diketahui bahwa Evo Morales merupakan pemimpin dari sayap kiri gerakan Cocalero / Federasi, yaitu kumpulan penanam daun Koka yang berisikan masyarakat Bolivia yang melawan upaya pemerintah Amerika Serikat dalam membasmi tanaman Koka di Bolivia.

Meskipun demikian, Bolivia sebagai negara yang masih memerlukan Amerika Serikat, tentunya perlu mempertimbangkan untuk menerima kerjasama serta kebijakan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Terlepas dari hal tersebut, Bolivia juga tetap harus mempertimbangkannya dengan seksama, mengingat Bolivia cukup bergantung terhadap tanaman koka sebagai keperluan sehari-hari dan juga pendorong ekonominya.

Maka dari itu, penelitian ini akan melihat bagaimana Evo Morales melakukan pengusiran terhadap DEA dengan berbagai macam pertimbangan berdasarkan latar belakang tentang kerjasama yang dilakukan oleh Bolivia dan Amerika Serikat. Telah dijelaskan diatas bahwa Bolivia sebagai negara yang bergantung kepada tanaman koka tentu tidak bisa menerima secara mentah kebijakan yang diatur oleh Amerika Serikat. Namun Bolivia juga tidak bisa

menolak mentah kebijakan yang diberikan oleh Amerika Serikat, mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan pengaruh yang cukup besar sehingga Bolivia dapat menjadikannya sebagai peluang untuk bekerjasama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: “Mengapa Evo Morales menghentikan *Drug Enforcement Administration* (DEA) pada tahun 2009”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah Bolivia dalam mengatasi penyebaran kokain
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan *War On Drugs* terhadap pemberantasan koka bagi masyarakat Bolivia
3. Untuk mengetahui pertimbangan pengusiran DEA oleh Evo Morales dari Bolivia

## **1.4 Cakupan penelitian**

Pada pembahasan topik Penghentian *Drug Enforcement Administration* (DEA) di Bolivia pada tahun 2009, penulis akan berfokus untuk membahas terkait tentang Mengapa Evo Morales menghentikan hingga mengusir *Drug Enforcement Administration* (DEA) pada tahun 2009 melalui pertimbangan yang telah dibuat.

Seperti yang telah disebutkan diatas, Bolivia dan Amerika Serikat telah membangun kerjasama dalam kebijakan War On Drugs. Kerjasama ini hadir untuk membatasi dan mengurangi penyebaran kokain tak hanya di amerika latin, tapi juga di wilayah lainnya.

Maka dari itu pemerintah Amerika Serikat menunjuk *Drug Enforcement Administration* (DEA) dengan tujuan untuk dapat menekan peredaran kokain ilegal di Bolivia, namun dalam prosesnya, DEA justru memberikan banyak pelanggaran dan pengaruh buruk bagi masyarakat Bolivia. Maka dari itu Evo Morales mengambil tindakan tegas dengan Mengusir DEA pada tahun 2009.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai bagaimana Presiden Evo Morales mengelola Bolivia sudah banyak dikaji dalam berbagai literatur seperti jurnal maupun Artikel artikel. Seperti di dalam Jurnal yang berjudul “ Keruntuhan Rezim Evo Morales Di Bolivia” yang ditulis oleh (Achsin, 2020) tersebut, Achsin berfokus membahas keruntuhan rezim Evo Morales di Bolivia, kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Evo Morales sangat beresiko dan membuat oposisi partainya menyerang rezimnya bersama sama. Sehingga terdapat perbedaan antara penulis jurnal tersebut dengan penelitian ini, penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana upaya Rezim Evo Morales dalam mengurangi penyebaran Koka di Bolivia.

Dalam penjelasan selanjutnya dalam jurnal “ Kerjasama Bilateral Amerika Serikat dengan Bolivia dalam Pemberantasan Kokain pada masa Pemerintahan Presiden Evo Morales ( Tahun 2006 – 2010) “ yang ditulis oleh (Samsul Ma’arif,

2013).Penulis menjelaskan tentang Kerjasama Bilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Bolivia justru berpengaruh kepada keamanan di Bolivia, seperti terjadi banyak pelanggaran pelanggaran HAM serta pelanggaran kemanusiaan yang mana melibatkan militer Amerika serikat dan militer lokal Bolivia, upaya upaya tersebut justru membuat ketidak seimbangan fungsi dari militer di Bolivia.

Maka dari itu dalam jurnal tersebut lebih berfokus bagaimana Kerjasama Bilateral antara Amerika Serikat dengan Bolivia dalam memberantas Kokain, sehingga penulis dalam penelitian hanya mengambil faktor spesifik bagaimana Peran Rezim Evo Morales dalam mengatasi permasalahan Kokain di Bolivia.

Penelitian yang selanjutnya dalam jurnal berjudul “Kebijakan Nasionalisasi Minyak dan Gas serta Legalisasi Koka di Bolivia dalam menghadapi Hegemoni Amerika Serikat” oleh (Muhskin, 2013) dimana peneliti tersebut membahas tentang bagaimana Kebijakan Bolivia dalam menasionalisasi minyak. Dijelaskan juga dalam jurnal tersebut bahwa, karakteristik geografisnya yang berkaitan dengan sumber daya alam yang mempengaruhi kebijakan Bolivia,dan faktor Amerika Serikat yang merugikan negara Bolivia dan justru mendapatkan keuntungan karena adanya Kerjasama (FTTA), dan pada jurnal tersebut lebih berfokus kearah bagaimana kebijakan nasionalis Bolivia dalam menghadapi hegemoni dari Amerika Serikat, sehingga penulis dalam penelitian hanya akan mengambil beberapa Kerjasama yang dilakukan oleh Bolivia terkait legalisasi Koka di Bolivia.

Penelitian berikutnya dalam jurnal berjudul “*The Role of Alternative Development in the “War on Drugs”*”: *The Case of Bolivia* oleh (Phan-Gruber,

2010). Pada jurnal ini membahas tentang Kerjasama Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat, PBB maupun Uni Eropa, ketiganya mempunyai peran penting dalam memerangi Narkotika di Bolivia. Di Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa program program tersebut walaupun belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil namun dapat menjadi pelajaran bagi negara lain untuk dapat mengontrol Narkotika di negaranya. Namun dalam jurnal tersebut hanya membahas tentang kebijakan yang dilakukan Bolivia dari tahun 1980 hingga 2008, sehingga penulis dalam penelitian ini hanya mengambil kebijakan serta Kerjasama yang dilakukan Bolivia dari tahun 2005 hingga 2008 karena terdapat persamaan tahun terhadap penelitian.

Pembahasan berikutnya terdapat dalam jurnal yang berjudul "*Evo's Bolivia: Continuity and Change.*" Oleh (Linda C. Farthing , Benjamin H. Kohl, 2014) didalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana hak hak minoritas adat, bagaimana perubahan konstitusi pada era Evo Morales dan juga bagaimana kebijakan yang dilakukan Evo Morales untuk mencapai kesejahteraan nasional bagi Bolivia, namun kebijakan tersebut membuat Bolivia sangat bergantung kepada negara asing untuk dapat memanfaatkan sumber daya alamnya dan yang membedakan jurnal tersebut dengan jurnal peneliti adalah, jurnal peneliti hanya berfokus mengambil beberapa bahasan tentang bagaimana Rezim Evo Morales mengatasi permasalahan Koka di Bolivia.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian tersebut masih terdapat kekurangan pada pembahasannya dimana hanya menjelaskan bagaimana Kerjasama yang dilakukan oleh Bolivia dan Amerika Serikat,PBB secara umum dan belum secara rinci. Sehingga, dalam hal ini penulis ingin menekankan

pembahasan terhadap bagaimana upaya Rezim Evo Morales dalam menghentikan DEA serta bagaimana kerjasama yang dilakukan Bolivia pada saat Rezim Evo Morales yang berdampak kepada kehidupan masyarakat Bolivia

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Decision Making / teori pengambilan keputusan, dimana menurut (Coplin, 1992) terdapat tiga faktor yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan dalam politik luar negeri suatu negara. Kondisi politik suatu negara, kondisi politik suatu negara punya peran penting dalam mengambil keputusan suatu negara, walaupun demikian faktor lain seperti kondisi ekonomi, kondisi militer serta konteks internasional di suatu negara juga penting dalam mengambil kebijakan di suatu negara tersebut. dimana suatu negara harus mempunyai kemampuan serta kekuatan untuk dapat menopang politik luar negerinya, faktor kondisi ekonomi dan kondisi militer suatu negara pun juga termasuk faktor yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan pertahanan dan juga keamanan di suatu negara.

Coplin juga mengategorikan politik domestik menjadi empat bagian yang tak kalah pentingnya, empat kategori tersebut ialah *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. *Bureaucratic influencer* adalah individu maupun organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu mengambil keputusan, *partisan influencer* bertujuan untuk merangkul tuntutan dari masyarakat terkait para pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kebijakan dari pemerintah. *interest influencer* terdiri dari orang-orang yang berkelompok dengan kepentingan yang sama dan dibutuhkan untuk menyerahkan

sumber-sumber untuk mendapatkan dukungan dari pengambilan keputusan yang lain. Dan terakhir *mass influencer*, faktor ini mengacu kepada banyaknya opini yang dimiliki oleh populasi yang akan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan yang lain, dan dampak dari *mass influencer* bermacam-macam tergantung kepada sistem politik di suatu negara.

Maka dari itu berdasarkan Teori Decision Making yang dijelaskan oleh (Coplin, 1992) Kondisi politik di Bolivia pada saat itu sedang dalam tahap pergantian, karena pada 2005 pasca kenaikan Evo Morales, banyak perubahan yang terjadi di dalam Bolivia misalnya, pergantian pemimpin yang awalnya didominasi orang kulit putih kini berganti menjadi masyarakat asli Bolivia, dan budaya budaya pemanfaatan tanaman koka di Bolivia tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Evo Morales mengeluarkan kebijakan tentang pelegalan penanaman tanaman koka seluas 20.000 hektar, dan kondisi militer di Bolivia pada saat itu mengalami kekacauan karena seharusnya DEA dapat menjadi penopang hubungan luar negeri antara Bolivia dan Amerika Serikat terbalik, dimana DEA tersebut justru banyak memberikan dampak negatif ke Bolivia.

Maka dari itu penulis akan mengaplikasikan teori pengambilan keputusan ini dalam menemukan mengapa Evo Morales menghentikan hingga mengusir *Drug Enforcement Administration* (DEA) pada tahun 2009, karena dengan teori ini penulis dapat mengkaji mengapa Evo Morales menghentikan bahkan mengusir *Drug Enforcement Administration* (DEA).

## **1.7 Argumen Sementara**

Maka dari itu berdasarkan teori pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh (Coplin, 1992). Faktor kondisi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional tersebut menjadi pertimbangan Evo Morales dalam mengambil keputusan untuk mengusir agen *Drug Enforcement Administration* (DEA) yang menjadi perwakilan dari Amerika Serikat untuk memberantas kokain illegal, karena Evo Morales melihat kondisi politik domestiknya akibat adanya DEA justru menjadi kacau, karena banyak partai oposisinya berusaha untuk menggulingkannya, bahkan bekerjasama dengan Amerika Serikat, dan dalam hal ekonomi dan militer, akibat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh *Drug Enforcement Administration* (DEA) dan justru memberikan kerugian yang cukup besar bagi negara Bolivia, bahkan negara lain seperti Venezuela dan Ekuador mengusir agen DEA karena banyak memberikan efek negatif bagi negaranya.

## **1.8 Metode Penelitian**

### ***1.8.1 Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. penelitian kualitatif dinilai tepat karena penelitian dalam bidang ilmu sosial adalah ilmu yang dapat berubah-ubah, dan tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan dengan penelitian lain yang relevan, sehingga kualitatif dinilai tepat dalam penelitian tersebut.

### ***1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian***

Dalam penelitian ini, subjek dalam penelitian adalah Pemerintahan Bolivia. Selain itu, objek dalam penelitian adalah, bagaimana penghentian yang dilakukan Evo Morales terhadap *Drug Enforcement Administration* (DEA) di Bolivia pada tahun 2009.

### ***1.8.3 Metode Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber, baik buku akademik, publikasi, jurnal ilmiah, serta surat kabar yang terbit berkala dengan memperhatikan kredibilitas media dan keterkaitan dengan topik.

### ***1.8.4 Proses Penelitian***

Dalam proses pengumpulan data penelitian,peneliti akan melakukan peninjauan terkait sumber bacaan, seperti tujuan buku, jurnal , latar belakang penulis dan keterkaitan buku atau jurnal dengan topik yang diambil oleh peneliti.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian pembahasan terkait penelitian ini, maka penulis melakukan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab,tujuan penelitian berisikan maksud dari rumusan masalah yang ditawarkan oleh peneliti,cakupan penelitian berisi tentang batasan

dalam penelitian, tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan singkat yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian, lalu landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis untuk dapat menjelaskan paparan yang telah dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini.

- Bab II : Tanaman koka sebagai kebutuhan bagi Bolivia dan permasalahan bagi Amerika Serikat. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang pola kehidupan masyarakat Bolivia yang mengkonsumsi koka serta pemanfaatan tanaman koka secara turun temurun, serta bagaimana rezim Evo Morales mengatasi kokain tersebut. Karena efek dari kokain, Amerika Serikat menetapkan secara resmi bahwa kokain adalah obat yang berbahaya, dan berkomitmen untuk memerangi obat-obatan terlarang sekaligus penyebarannya, tak hanya berlaku di Amerika Serikat, tapi juga diterapkan di wilayah Amerika Selatan, salah satunya negara penghasil tanaman koka terbesar yaitu Bolivia.
- Bab III : Dinamika penghentian *Drug Enforcement Administration* oleh Bolivia pada tahun 2009. Pada bab ini, peneliti akan menerangkan tentang apa yang menjadi pertimbangan Evo Morales terkait penghentian & pengusiran *Drug Enforcement Administration* di Bolivia dengan menggunakan teori Decision Making, karena Evo Morales melihat adanya *Drug Enforcement Administration* justru menyebabkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat Bolivia.
- Bab IV : Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta rekomendasi. Peneliti serta pembaca proposal skripsi

dapat membaca Kembali secara keseluruhan penelitian yang sudah diteliti di dalam kesimpulan. Selain itu, rekomendasi dari peneliti bertujuan untuk menyampaikan saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TANAMAN KOKA SEBAGAI KEBUTUHAN BAGI BOLIVIA DAN PERMASALAHAN BAGI AMERIKA SERIKAT**

#### **2.1. Tanaman Koka Sebagai Kebutuhan Masyarakat Bolivia**

Masyarakat asli Bolivia mengenal koka dengan penggunaan nama koka yang berasal dari kata “Khoka” yang berarti pohon. Tanaman koka merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan, dan salah satu tanaman yang dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Tanaman koka banyak mengandung komponen alkaloid, dimana komponen yang paling terkenal ialah kokain sehingga menjadi bahan baku dalam pembuatan kokain. Tanaman koka diketahui memiliki 2 jenis tanaman, namun yang paling terkenal ialah coca “Bolivia” atau “Huanuco” karena tanaman jenis ini terus dibudidayakan secara luas di wilayah Andean oleh masyarakat Indian Aymara, yaitu suku asli di Bolivia karena sejak dahulu suku Indian Aymara sudah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-harinya sehingga tidak dapat dipisahkan, bahkan hingga sekarang (Amy Sue Biondich, 2016).

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tanaman koka di Bolivia merupakan bagian yang cukup penting untuk kehidupan masyarakat tradisional Bolivia. Seiring berjalannya waktu, manfaat tanaman koka semakin luas, bahkan telah digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti menjadi bagian dari bahan makanan, bahan untuk ritual dan kepercayaan, untuk pelengkap acara bagi masyarakat, bahkan terdapat beberapa catatan yang menunjukkan bahwa tanaman koka bahkan digunakan sebagai medis seperti obat-obatan (Natariandi, 2009).

Hingga saat ini, tanaman Koka juga telah. dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat Bolivia.

Saat ini, kebanyakan dari masyarakat Bolivia bekerja sebagai petani tanaman Koka (Samuel, Kisah Sukses Bolivia Memerangi Narkoba, 2017). Tanaman koka sejauh ini dilihat sangat bernilai dan memiliki pasar yang cukup tinggi. Pengolahan yang tepat dengan hasil yang bagus dari tanaman koka juga akan meningkatkan harga dari tanaman koka itu sendiri. Tak heran, pada akhirnya banyak masyarakat Bolivia yang pada akhirnya memilih untuk menjadi petani.

Hal ini bukan tanpa sebab, karena pada awalnya produksi tanaman koka di Bolivia pada tahun 1978 sebesar 35,000 ton. Namun pada tahun 1985 terjadi peningkatan yang cukup drastis mencapai angka 150,000 ton, dari peningkatan produksi tanaman koka tersebut, para petani dapat meraup keuntungan dari hasil produksi koka antara \$6000 hingga \$9000 untuk perhektarnya tanah yang yang ditanami tanaman koka (Haely, Bolivia and Cocaine: a developing country's dilemmas, 1988).

Dengan adanya kebijakan *Land Reform* yaitu kebijakan menyerahkan tanah seluas seperlima lahan negara untuk para petani miskin di daerah kota Santa Cruz yang dikeluarkan Evo Morales tersebut, bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi petani tanaman koka. Pengelolaan lahan wilayah tersebut tentunya memerlukan tenaga yang tidak sedikit, dan tentunya perlu tambahan pekerja, Dengan adanya kebutuhan tambahan tenaga ini para petani penghasil daun koka mengajak para pemuda, pedagang dan bahkan guru untuk ikut menanam tanaman koka. Penghasilan dari daun koka tersebut dibagi sesuai keterampilan masing-

masing, untuk pekerja yang kurang terampil akan mendapatkan upah sebesar \$6-8 perhari, sedangkan bagi para pekerja yang dinilai terampil, biasanya akan ditempatkan di laboratorium dengan upah sebesar \$10-12 perhari. Dengan kondisi para petani tersebut menyebabkan orang-orang yang berada di perkotaan berpindah ke desa karena berpandangan bahwa penghasilan petani di pedesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan para pekerja di perkotaan (Haely, Bolivia and Cocaine: a developing country's dilemmas, 1988).

Karena harga tanaman koka memiliki harga yang sangat bernilai dan cukup tinggi, membuat sebagian besar masyarakat Bolivia berprofesi sebagai petani, hasil tani tersebut adalah daun koka, bahkan pada tahun 1987 hingga tahun 1989 jumlah ekspor kokain sama besarnya dengan ekspor legal, bahkan dengan ekspor kokain tersebut, dapat mempekerjakan 2 - 6% total populasi di Bolivia dan membuat perekonomian Bolivia meningkat. (Haely, Bolivia and Cocaine: a developing country's dilemmas, 1988). Dengan sebagian besar masyarakat Bolivia berprofesi sebagai petani tanaman Koka, dan bahan dasar pembuatan Kokain pun mudah untuk dicari yang menyebabkan negara Bolivia menjadi Negara penghasil Kokain terbesar ketiga di dunia setelah negara Peru dan juga negara Kolombia (Samsul Ma'arif, 2013).

Secara tidak langsung tanaman koka berhasil meningkatkan devisa negara dan memperkuat demokrasi dengan meningkatkan pendapatan serta standar hidup masyarakat Bolivia (Franco & Godoy, 1992). Tidak dapat dipungkiri, Bolivia sempat menjadi negara kedua termiskin di wilayah Amerika Latin tentunya pemerintahan Bolivia saat itu perlu memanfaatkan setiap komponen yang dimiliki

oleh negara untuk mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan sebaik mungkin penjualan tanaman koka. Pada tahun 1990-an Bolivia mengalami pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan relatif kuat, karena terjadinya ledakan produksi koka serta migrasi petani ke wilayah Chapore. Kejadian ini disebabkan karena meningkatnya jumlah permintaan Internasional terhadap kokain (Rafdi, 2014).

## **2.2 Kerjasama sebagai upaya Amerika Serikat untuk masuk ke Bolivia dan mempengaruhi kebijakan dari Evo Morales**

Kerjasama antara Bolivia dengan Amerika Serikat dalam memberantas kokain sudah terjalin sejak lama. Namun baru tahun 1995 Amerika Serikat mewajibkan Bolivia untuk menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral karena pada saat itu Bolivia melakukan legalisasi produksi koka yang menyebabkan produksi koka meningkat setiap tahunnya dan Amerika Serikat merasa bahwa masyarakat Bolivia telah melakukan pelanggaran dengan terus memproduksi daun koka yang bisa dijadikan bahan baku pembuatan kokain, walaupun begitu pemerintah Bolivia tidak secara langsung mengiyakan perjanjian tersebut dan melakukan peninjauan hukum selama beberapa bulan, akhirnya pemerintah Bolivia menyetujui perjanjian itu dan dengan perjanjian tersebut secara tidak langsung Amerika Serikat ikut serta secara langsung untuk membasmi kokain di Bolivia (Samsul Ma'arif, 2013).

Ketika Hugo Banzer menjadi presiden pada tahun 1997, pemerintah Bolivia meratifikasi Undang-undang *War on Drugs 1008* dan akan membantu memfasilitasi Amerika Serikat untuk memerangi arus narkotika. Hugo Banzer saat itu dalam

kondisi yang sulit, karena sedang memerangi Kokain ilegal di Bolivia, dilain sisi Bolivia dihadapkan oleh kepentingan Amerika Serikat yang melarang penjualan koka ilegal dan memusnahkan 50 ribu hingga 60 ribu hektar ladang koka. Efek bagi masyarakat lokal Bolivia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani ialah kehilangan penghasilan serta mendapatkan kekerasan secara fisik. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para petani, karena Hugo Banzer menerapkan kebijakan tersebut tanpa memberikan solusi tentang permasalahan yang ada (Samsul Ma'arif, 2013).

Hal ini kemudian ditanggapi pada masa kepemimpinan Evo Morales, pada saat kepemimpinan Evo Morales, perekonomian di Bolivia kurang stabil karena pertambangan perak Bolivia bergantung kepada harga pasar dunia serta Bolivia sangat bergantung kepada bantuan finansial dan eksplorasi terhadap pertambangan gas dan minyak bumi (Rafdi, 2014). Bolivia tidak mempunyai pilihan lain selain mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dengan cara menerima strategi perekonomian yang diatur oleh IMF dan Bank Dunia melalui SAP. Bahkan pada masa pemerintahan presiden Eisenhower, pemerintah Amerika Serikat pernah mengirimkan seorang penasehat perekonomian bernama George Jackson Eder dengan tujuan untuk dapat membantu pemerintah Bolivia dalam melakukan penurunan tingkat inflasi, pengurangan subsidi negara, memberlakukan sistem tukar mata uang, serta menetapkan kontrol terhadap harga dan gaji yang bertujuan menstabilkan perekonomian Bolivia (Rafdi, 2014).

Namun pada masa pemerintahan Evo Morales, Bolivia merubah kebijakan luar negerinya yang awalnya berkiblat ke Amerika Serikat, kini justru menjadi anti Amerika Serikat. Dikarenakan Evo Morales menganggap bahwa perusahaan-

perusahaan dalam negeri dikendalikan oleh IMF dan Bank Dunia atas instruksi dari Amerika Serikat, maka dari itu Evo Morales menganggap bahwa Amerika Serikat melakukan neo-imperialisme karena terlalu mencampuri urusan dalam negeri Bolivia, dan Amerika Serikat serta sekutunya telah melakukan neo-imperialisme pada sektor ekonomi Bolivia, hal tersebutlah yang menyebabkan rakyat Bolivia mengalami kemiskinan.

Bahkan pada tanggal 10 September 2008, pemerintah Bolivia mengusir Duta Besar Philip Goldberg dan memberikan kurun waktu 72 jam untuk meninggalkan Bolivia. Karena Duta Besar Amerika Serikat tersebut dinilai melakukan penentangan kepada Bolivia karena bekerjasama dengan *media Luna* / gabungan dari provinsi-provinsi di Bolivia yang kaya akan sumber daya gas dan minyak bumi menuntut untuk melakukan desentralisasi untuk menggagalkan proses nasionalisasi pemerintah Bolivia (Musthafa, 2016).

Saat Richard Nixon masih menjadi presiden Amerika Serikat, mendirikan Amerika Serikat dan Bolivia sepakat untuk bekerjasama dalam memerangi kokain, Amerika Serikat mengutus DEA (*Drug Enforcement Administration*) yang berjumlah 84 orang di Bolivia, 20 diantaranya adalah aparat penegak hukum yang ditempatkan di beberapa tempat seperti, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chapere dan Trinidad dengan tujuan untuk mengurangi peredaran kokain ilegal dan obat-obatan terlarang lainnya di Bolivia. Di Bolivia. Untuk membantu mempercepat proses pengurangan peredaran kokain ilegal dan obat-obatan terlarang di Bolivia, Pada tahun 1984 DEA (*Drug Enforcement Administration*) membentuk UMOPAR (*Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales*) dengan persetujuan dari pemerintah Bolivia, UMOPAR berisikan 300 polisi lokal Bolivia yang diberikan

pelatihan khusus dari DEA seperti taktik taktik penyergapan dan operasi militer (Mitchell, 2010). Namun dalam penerapan tugasnya, UMOPAR justru melakukan kegiatan negatif seperti menangkap para penduduk sipil, melakukan kekerasan bahkan membunuh para petani koka, maka dari itu pemerintah Bolivia merasa curiga dengan agen DEA karena dinilai telah memberikan pengaruh buruk, akhirnya pada November 2009 pemerintah Bolivia menghentikan kerjasama *War On Drugs* dengan menutup DEA (*Drug Enforcement Administration*) (Tyas, 2013). Tak hanya menutup DEA, pemerintah Bolivia juga mengusir para anggota DEA.

Amerika Serikat mempunyai badan Lembaga bantuan internasional bernama USAID (*United States Agency for International Development*). Lembaga tersebut memberikan bantuan internasional kepada negara negara yang sedang terkena dalam musibah, seperti negara yang sedang terkena bencana, negara yang terlibat dalam reformasi demokrasi, serta negara yang berkembang keluar dari kemiskinan. Bolivia dan Amerika Serikat meningkatkan hubungan kerjasama mereka dengan membentuk USAID pada tahun 1960. Pada saat Evo Morales menjabat sebagai presiden USAID lebih berfokus untuk membantu demokrasi di Bolivia, dengan cara menyediakan peluang perekonomian di bidang pertanian, perdagangan dan juga bisnis untuk para penduduk di pedesaan, mereka juga memberikan alternatif kepada para petani di Chapere dan lembah Yungas untuk produksi koka (Rafdi, 2014).

Namun pada tahun 2009, atas permintaan dari pemerintah Bolivia, USAID memberhentikan bantuan mereka terhadap demokrasi dan pemerintahan Bolivia. Puncaknya pada September tahun 2013, atas permintaan Presiden Evo Morales, USAID dan Bolivia mengakhiri kerjasama mereka dan meminta meninggalkan

Bolivia. Karena sejak terpilihnya Evo Morales, muncul berbagai permasalahan seperti destabilisasi politik, sosial dan juga keamanan di Bolivia dengan tujuan untuk menggulingkan Evo Morales, dan menganggap bahwa cara-cara tersebut merupakan strategi dari Amerika Serikat karena pada saat kepemimpinan Evo Morales, Amerika Serikat justru tidak mendapatkan keuntungan.

### **2.3 DEA sebagai alat intervensi oleh Amerika Serikat terhadap Bolivia**

Pada tahun 1970 Amerika Serikat telah melakukan perang terhadap obat-obatan berbahaya yang terkenal dengan nama *War On Drugs* dan menunjuk agen DEA untuk melumpuhkan peredaran narkoba dengan menemukan, menangkap serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menghukum dan memenjarakan para pengedar. Di Bolivia permasalahan koka baru datang saat Hugo Banzer terpilih menjadi presiden Bolivia. Hugo Banzer menjanjikan kepada Amerika Serikat akan memusnahkan ladang koka, dan Bolivia akan mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat untuk pembangunan nasional Bolivia, Hugo Banzer saat itu membuat kebijakan *Coca Zero*, dimana kebijakan ini bertujuan untuk membasmi ladang koka dan memberikan alternatif lain bagi para petani, namun kebijakan ini justru memberikan kerugian kepada masyarakat Bolivia karena pembasmian ladang koka ini menghilangkan mata pencaharian para petani Koka, dan juga para petani koka dibunuh oleh para militer.

Dan mengeluarkan undang-undang tentang narkoba di Bolivia mulai berlaku sejak tahun 1988, dimana pada saat itu parlemen nasional Bolivia mengeluarkan kebijakan tentang pengendalian koka yang dituangkan dalam Law

1008, seperti pasal 35 tentang “tidak seorang pun atau badan hukum yang boleh memiliki dalam bentuk/jumlah apapun obat-obatan yang mengandung narkoba, tanpa izin dari kementerian kesejahteraan sosial dan masyarakat, pasal 37 menyebutkan bahwa pengonsumsi obat-obatan yang mengandung narkoba dilarang untuk di konsumsi, pasal 48 , setiap orang yang melakukan perdagangan zat terlarang akan diancam pidana penjara paling lama sepuluh sampai dua puluh lima tahun, ditambah denda sepuluh sampai dua puluh kali lipat dari tarif harian, dan pasal 49, orang-orang yang ketergantungan akan ditangkap karena memiliki bahan-bahan pembuatan narkoba (tni 2015) .

Maka dari itu pada saat Evo Morales menjadi presiden Bolivia, DEA dilarang beroperasi dan di usir dari Bolivia karena berbagai kegiatan yang dilakukan agen DEA justru memberikan efek negatif kepada para petani koka terutama para petani yang ada di wilayah provinsi Chapere, seperti menangkap para penduduk sipil, melakukan kekerasan bahkan membunuh para petani koka. Untuk melindungi tanaman koka dan melindungi para petani koka yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan sudah digunakan oleh masyarakat asli Bolivia, Evo Morales menetapkan kebijakan untuk membatasi ladang koka yang hanya terletak di Wilayah Yungas dan Chapere, mereformasi Law 1008 dan juga membuat undang-undang untuk melindungi para petani dan tanaman koka, yaitu pasal 384 : *The State shall protect native and ancestral coca as cultural patrimony, a renewable natural resource of Bolivia's biodiversity, and as a factor of social cohesion; in its natural state it is not a narcotic. Its revaluing, production, commercialization, and industrialization shall be regulated by law.*

Perdagangan kokain telah menyebabkan banyak sekali bahaya bagi Bolivia, seperti korupsi, kerusakan kekerasan, ketergantungan ekonomi bahkan perpecahan sosial dan militerisasi. Perdagangan kokain memberikan \$500 - \$x`600 juta ke ekonomi domestik setiap tahunnya dan jumlah tersebut setara dengan total pendapatan ekspor negara pada tahun 1980-an. Operasi *Blast Furnance* pada tahun 1996 yang dilakukan oleh Amerika Serikat memberikan bantuan pelatihan seperti (pelatihan penerbangan dan penanggulangan pemberontakan) dan memberikan helikopter kepada UMOPAR untuk mencari serta menghancurkan fasilitas pemrosesan koka. Operasi ini mengerahkan kurang lebih 300 orang UMOPAR, 1.500 tentara Bolivia, 160 personil angkatan darat serta enam helikopter Blackhawk dengan tujuan membantu pemerintah Bolivia untuk melenyapkan laboratorium kokain di wilayah Santa Cruz dan wilayah Chapere (Mitchell, 2010).

Operasi *Snow Cap Operation* / Operasi anti Narkotika yang dilakukan antara 1987 hingga 1994. Dimana dalam operasi ini DEA mengerahkan 100 orang anggotanya dan bekerjasama dengan *Border Patrol Tactical Unit (BORTAC)* / unit patroli perbatasan Amerika Serikat dengan dibantu oleh polisi maupun pasukan militer sembilan negara di wilayah Amerika Latin (Nixon, 1973). Dalam operasi *Snow Cap Operation* tersebut berhasil memusnahkan 2.400 tempat pembuatan koka, 4.400 galon bahan kimia untuk bahan dasar pembuatan kokain telah disita, 7.500 ton daun koka 21.000 ton pasta koka berhasil dimusnahkan, dan juga dapat menangkap lebih dari 1.000 pengedar kokain.

Walaupun DEA sudah memperketat peredaran kokain dan sempat mengalami penurunan, namun kemudian naik kembali bahkan dengan harga tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, upaya yang dilakukan DEA tersebut membuat

ketidakstabilan politik di Bolivia, dimana terjadi perlawanan dari kalangan para petani koka dan banyak terjadi korupsi dari militer dan polisi Bolivia (Isikoff, 1989).

Pada saat Hugo Banzer naik sebagai presiden pada tahun 1997, dia melakukan kebijakan *Plan Dignidad* dengan dukungan dari Amerika Serikat, dengan membangun tiga pangkalan militer di wilayah penghasil utama koka. dimana kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan produksi koka ilegal. Kebijakan tersebut bertujuan untuk pemberantasan dan penanggulangan kokain, namun dalam prosesnya telah menurunkan standar hidup petani koka secara signifikan di daerah Chapare, bahkan masyarakat Indian Aymara menanam koka secara diam-diam untuk digunakan sebagai teh maupun dikunyah, maka dari itu pada tahun 2000, masyarakat Bolivia seperti, para petani, guru, bahkan mahasiswa menuntut pemerintah pada saat itu untuk mengizinkan mereka menanam koka walaupun 1.600 meter persegi, serta menuntut agar pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

Walaupun pemerintah dan masyarakat sudah melakukan kesepakatan untuk meredakan masa, namun kesepakatan tersebut bersifat sementara karena tetap melakukan kebijakan nol coca. Maka dari itu masyarakat melakukan perlawanan besar sebagai reaksi atas implementasi *Plan Dignidad*. Protes petani Chapare yang menentang operasi militer mengakibatkan 33 petani Chapare terbunuh dan 570 petani lainnya terluka (Thomas Grisaffi, 2021).

Bahkan pada saat Presiden Jorge Quiroga naik sebagai Presiden Bolivia pada tahun 2001, dia memperketat kebijakan produksi koka ilegal, dengan

membatasi pengeringan, pengangkutan dan penjualan koka. Dan menyebabkan sejumlah bentrokan dan mengakibatkan kematian antara pengunjung rasa dan pasukan polisi Bolivia. Walaupun sudah ada perjanjian damai diantara kedua belah pihak, namun permasalahan intinya belum dapat terselesaikan. Pada saat pemerintahan kedua Presiden Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante pada tahun 2003, terjadi kembali bentrokan antara para pengunjung rasa dan aparat keamanan, bahkan tercatat lebih dari selusin orang meninggal dalam bentrokan tersebut dan pemerintah pada saat itu kehilangan kendali atas salah satu tempat penghasil koka utama yaitu wilayah Chapere (Barr, 2005).

**BAB III**  
**PENGARUH POLITIK DALAM NEGERI, EKONOMI DAN MILITER**  
**SERTA KONTEKS INTERNASIONAL TERHADAP**  
**PENGHENTIAN *DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION* DI**  
**BOLIVIA PADA TAHUN 2009**

**3.1 Pengaruh Politik Domestik**

**3.1.1 Lingkungan Politik Domestik Bolivia**

Dalam pengambilan keputusan di Bolivia, Evo Morales menjadi individu yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, karena ketika Evo Morales naik menjadi Presiden Bolivia, dia melakukan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan dari Amerika Serikat, dimana Evo Morales membuat kebijakan *Land Reform* yaitu memberikan seperlima lahan negara atau seluas 3,1 hektar untuk 60 kelompok masyarakat Indian Aymara di wilayah timur Bolivia. Lahan negara yang diserahkan berada di kota Santa Cruz karena kota ini adalah wilayah pertanian dan pusat kekuasaan para pengusaha lahan (Samsul Ma'arif, 2013), dengan tujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi petani tanaman koka.

Pengelolaan lahan wilayah tersebut tentunya memerlukan tenaga yang tidak sedikit, dan tentunya perlu tambahan pekerja, Dengan adanya kebutuhan tambahan tenaga ini para petani penghasil daun koka mengajak para pemuda, pedagang dan bahkan guru untuk ikut menanam tanaman koka. Penghasilan dari daun koka tersebut dibagi sesuai keterampilan masing-masing, untuk pekerja yang kurang

terampil akan mendapatkan upah sebesar \$6-8 per hari, sedangkan bagi para pekerja yang dinilai terampil, biasanya akan ditempatkan di laboratorium dengan upah sebesar \$10-12 per hari. Dengan kondisi para petani tersebut menyebabkan orang-orang yang berada di perkotaan berpindah ke desa karena berpandangan bahwa penghasilan petani di pedesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan para pekerja di perkotaan (Haely, Bolivia and Cocaine: a developing country's dilemmas, 1988).

Kebijakan yang dikeluarkan Evo Morales tersebut banyak mendapatkan dukungan dari para penduduk asli Bolivia pada saat pemilihan Evo Morales hingga 3 periode, karena kebijakan tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bolivia, dan juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat asli Bolivia, terutama bagi masyarakat adat Indian Aymara untuk mendapatkan tanaman koka yang menjadi bahan utama adat mereka. Saat Evo Morales menjabat sebagai Presiden Bolivia, dia juga memberikan lebih banyak respon kepada masyarakat adat, seperti memberikan rancangan draft konstitusi baru untuk menasionalisasi perusahaan gas, melegalkan dan memperbesar luas lahan pertanian koka, bahkan memberikan sekitar 50% gajinya untuk memperbanyak guru.

Terdapat empat faktor dalam politik domestik, yaitu *bureaucratic influencer, partisan influencer, interest influencer, dan mass influencer*. *Bureaucratic influencer* dalam isu DEA di Bolivia yang memberikan pengaruh terhadap Evo Morales, karena partai MAS yang dikepalai oleh Evo Morales mempunyai peran penting untuk pengambilan keputusan yang dikeluarkan Evo Morales, karena partai ini dibentuk untuk menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat dan melawan AS untuk membasmi koka di Bolivia (Samsul Ma'arif 2013).

*partisan influencer* dalam isu ini adalah organisasi suku Aymara karena, suku Indian Aymara sudah memanfaatkan koka sejak ribuan tahun lalu dan mereka ingin agar penanaman koka tersebut tidak dibatasi. *interest influencer* dalam isu ini adalah Cocalero, dimana Cocalero berisikan para petani koka yang menginginkan kebebasan untuk penanaman koka di Bolivia. *mass influencer* dalam isu ini adalah masyarakat Bolivia, karena masyarakat terutama yang bersuku Indian Aymara menganggap bahwa DEA ini tak hanya merugikan para petani koka, namun juga merugikan masyarakat yang tidak menanam koka, seperti dibunuh dan di tangkap.

Dalam proses kepemimpinannya, Evo Morales melakukan beberapa kebijakan seperti, meresmikan pabrik untuk mengelola koka di daerah Yungas, dimana pabrik tersebut didanai oleh Presiden Venezuela bernama Hugo Chavez yang menyediakan 1 juta dollar AS (Samsul Ma'arif, 2013), dengan tujuan untuk menghasilkan produk-produk legal seperti minuman ringan dan teh. Karena pemerintah Venezuela mengetahui bahwasanya mengolah daun koka tersebut tidak membahayakan karena koka bukanlah narkoba. Evo Morales juga mengeluarkan kebijakan untuk menasionalisasi industri minyak dan gas bumi pada 1 Mei 2016, dimana kebijakan ini mengambil alih saham swasta sebesar 51% oleh negara dan menetapkan perusahaan YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) sebagai perusahaan induk negara untuk mengatur segala urusan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi negara (Musthafa, 2016).

Partai yang dikepalai oleh Evo Morales juga mempunyai peran penting untuk pengambilan keputusan yang dikeluarkan Evo Morales, karena karena partai ini awalnya dibentuk untuk menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat, namun dalam perkembangannya partai ini bertindak sebagai partai anti-imperialis dan anti-

neoliberal, dengan cara melakukan penolakan terhadap cara-cara DEA untuk memberantas tanaman koka. Dan masyarakat juga mempunyai peran yang penting, dimana masyarakat Bolivia menginginkan pengusiran atas nama Bolivia untuk melindungi budaya mengunyah daun koka.

Karena kebijakan Evo Morales yang mementingkan kepentingan masyarakat adat dan melindungi tanaman koka serta bertolak belakang dengan kebijakan dari Amerika Serikat yang membuat hubungan kedua negara meregang, maka banyak dari partai oposisinya berkonspirasi dengan memberikan bantuan kelompok anti-pemerintah yang diperintah oleh oposisinya untuk melawan para polisi dan pemerintahannya, bahkan ada dugaan bahwa Amerika Serikat membantu membiayai kelompok tersebut untuk menggulingkan Evo Morales.

Seperti pada tahun 2008, Evo Morales mengusir duta besar Amerika Serikat yang bernama Philip S. Goldberg, dikarenakan dia bekerjasama dengan gabungan dari provinsi-provinsi di Bolivia yang kaya akan sumber daya gas dan minyak bumi menuntut untuk melakukan desentralisasi untuk menggagalkan proses nasionalisasi pemerintah Bolivia (Musthafa, 2016).

Lalu pada November 2009, Evo Morales melakukan penghentian serta pengusiran terhadap 84 orang agen DEA (*Drug Enforcement Administration*), karena menuduh agen DEA melakukan Spionase politik, dan berkonspirasi memberikan bantuan kelompok anti-pemerintah yang diperintah oleh oposisinya untuk melawan para polisi dan pemerintahannya (Tyas, 2013). Bahkan Evo Morales pada tahun 2009, juga melakukan *Persona non grata* kepada diplomat Amerika Serikat yang bernama Fransisco Martinez, dimana Evo Morales menuduh

bahwa diplomat tersebut melakukan kontak dengan kelompok oposisi (Achsinn, 2020).

### **3.1.2 Kondisi sosial saat keberadaan DEA**

Masyarakat asli di Bolivia yang dikenal dengan nama Indian Aymara telah memanfaatkan tanaman koka dalam kehidupan sehari-harinya selama berabad-abad. Bagi Indian Aymara, koka merupakan tanaman suci yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka selama berabad-abad bahkan hingga sekarang. Masyarakat Bolivia juga menjadikan tanaman koka sebagai salah satu kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan keseharian mereka, seperti menjadikan daun koka sebagai bahan pembuatan teh, berbagai bahan masakan makanan, sebagai bahan dalam proses pengobatan, bahkan tanaman koka juga menjadi salah satu kebutuhan dalam pengadaan acara-acara keagamaan sehingga bagi masyarakat Bolivia tanaman koka telah menjadi salah satu barang esensial.

Seiring berjalannya waktu, manfaat tanaman koka semakin luas, tanaman koka tak hanya sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun pemanfaatannya pun berkembang menjadi salah satu komoditas yang dapat menunjang ekonomi Bolivia karena dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat Bolivia dan tanaman koka sejauh ini dilihat sangat bernilai dan memiliki pasar yang cukup tinggi. Saat ini, kebanyakan dari masyarakat Bolivia bekerja sebagai petani tanaman Koka (Samuel, Kisah Sukses Bolivia Memerangi Narkoba, 2017). Tak heran, pada akhirnya banyak masyarakat Bolivia yang pada akhirnya memilih untuk menjadi petani.

Dikarenakan Amerika Serikat melakukan kebijakan *War on Drugs* di Bolivia, dengan menunjuk agen DEA sebagai perwakilannya, menyebabkan berpengaruh signifikan terhadap nasib dan penderitaan petani koka di wilayah Chapare dan Yungas ketimpangan yang cukup terlihat terutama pada perempuan dan anak-anak. Hal ini karena kebijakan yang dibuat tidak tertaut kepada kondisi Bolivia saat itu, dimana saat itu masih banyak keseimbangan antara masyarakat yang kaya dan miskin hingga masyarakat yang masih tergolong sebagai masyarakat adat. Dan yang paling berdampak terhadap kebijakan *War On Drugs* tersebut adalah para wanita, dimana para wanita dan anak-anak mengalami berbagai pelanggaran seperti pelecehan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh badan yang dibuat oleh DEA yaitu UMOPAR.

UMOPAR dalam menjalankan misinya justru memberikan banyak dampak negatif, dan melakukan pelanggaran kepada kemanusiaan kepada masyarakat Bolivia, dimana mereka melakukan penganiayaan para penduduk, merampok rumah penduduk saat malam hari dan bahkan melukai serta mencuri milik penduduk, perilaku sewenang wenang dari UMOPAR tersebut bahkan hal tersebut didanai oleh Amerika Serikat.

Karena dorongan dari Amerika Serikat melalui DEA, Bolivia melakukan Kebijakan *Law 1008* , dimana kebijakan ini bertujuan pembasmian ladang koka dan menetapkan tiga kategori dalam penanaman koka yaitu pertama ,menanam koka di daerah Yungas seluas 12.000 hektar dilegalkan oleh pemerintah Bolivia, kedua, tanaman koka di daerah Chapere harus dimusnahkan namun pemerintah akan memberikan kompensasi kepada para petani di daerah tersebut berupa pengembangan tanaman alternatif lain, dan yang ketiga selain daerah chapere dan

Yungas, tanaman koka harus diberantas tanpa adanya kompensasi maupun pengembangan alternatif lainnya (Sagung Uttami Subamia Uttari, 2019).

Dengan adanya kebijakan law 1008 tersebut menyebabkan penjara yang bernama *The prison of San Sebastian* di Bolivia kelebihan batas atas para narapidana yang berkaitan dengan kokain, kurangnya ruang penjara yang ada di *The prison of San Sebastian* menyebabkan kurangnya ruang bagi narapidana, para narapidana mendapatkan perlakuan yang kurang pantas , seperti tidur di lorong dan lantai, kelaparan yang dirasakan para narapidana karena kurangnya pasokan makanan, serta minimnya pelayanan medis. Kejadian tersebut lumrah terjadi akibat dari sesaknya penjara tersebut dan itu konsekuensi dari adanya kebijakan Law 1008, karena Sebagian anggota UMOPAR sewena-wena dalam pemberantasan kokain (Santos, 2002).

Masyarakat menanggapi kebijakan DEA tersebut dengan perlawanan karena menanam koka adalah sumber pendapatan utama mereka dan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal Bolivia. Maka dari itu dibentuklah gerakan sosial *MAS* yang dikepalai oleh Evo Morales yang berisikan federasi serikat petani koka dan masyarakat adat yang bertujuan untuk melakukan berbagai cara penolakan seperti protes dan blokade jalan. Ancaman terhadap stabilitas nasional Bolivia yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program-program yang dijalankan DEA tersebut tidak menghasilkan pengurangan produksi koka secara signifikan maka dari itu Amerika Serikat mendorong pemerintah Bolivia untuk mengambil tindakan tambahan melalui pembuatan kebijakan domestik yang agresif. Dan menerapkan kebijakan internal yang ditujukan untuk memusnahkan

daun koka sebagai upaya untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap strategi *War on Drugs* di Bolivia.

Pada saat Evo Morales menduduki jabatan sebagai presiden Bolivia, dia merubah arah kebijakan Bolivia yang awalnya berkiblat ke Amerika Serikat, kini menjadi anti Amerika Serikat dan menolak adanya campur tangan dari pihak asing dalam urusan negaranya, dikarenakan sejak terpilihnya Evo Morales, Amerika Serikat terlalu mencampuri urusan dalam negeri Bolivia sehingga muncul berbagai permasalahan distabilisasi politik, sosial serta keamanan di Bolivia contohnya melakukan spionase politik, mendanai kelompok kriminal, bahkan memberikan bantuan kepada partai oposisinya untuk melawan pemerintahnya, dengan tujuan untuk menggulingkan kursi jabatan Evo Morales (Sagung Uttami Subamia Uttari, 2019). Karena Amerika Serikat menilai kebijakan yang dikeluarkan Evo Morales bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat.

Tekanan yang dirasakan oleh Bolivia kian bertambah, karena Brazil yang wilayahnya berdekatan langsung dengan Bolivia terkena dampak dari peredaran kokain dan menuntut agar Bolivia segera menyelesaikan masalah perdagangan kokain dengan cara melakukan cara ekstrim seperti menembak warga sipil di perbatasan wilayah Brazil dan Bolivia (Samsul Ma'arif, 2013).

## **3.2 Ekonomi dan Militer**

### **3.2.1 Dampak terhadap Keamanan Nasional pada saat DEA**

Karena tekanan dari Amerika Serikat agar Bolivia mengambil tindakan tegas, akhirnya pada tahun 1984 Amerika Serikat dan Bolivia bekerja sama untuk membentuk pasukan khusus anti narkoba yang bernama UMOPAR (*Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales*) atau dikenal dengan nama tim Leopardos, anggota dari UMOPAR dipilih dan diseleksi oleh agen DEA dari para polisi yang paling terampil di Bolivia (Malamud-Goti, 1990), Dengan para polisi yang sudah diseleksi maka didirikanlah UMOPAR yang berisikan 300 polisi lokal Bolivia yang diberikan pelatihan khusus dari DEA seperti taktik-taktik penyergapan dan operasi militer (Mitchell, 2010), dengan tujuan untuk menjadikan UMOPAR sebagai pasukan elit dalam perang di hutan dan dapat lebih efisien dalam memerangi produksi kokain.

Operasi *Blast Furnance* yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1996 ini mengerahkan kurang lebih 300 orang UMOPAR, 1.500 tentara Bolivia, 160 personil angkatan darat serta enam helikopter Blackhawk dengan tujuan membantu pemerintah Bolivia untuk melenyapkan laboratorium kokain di wilayah Santa Cruz dan wilayah Chapere (Mitchell, 2010).

Operasi *Snow Cap Operation* yang dilakukan antara tahun 1987 hingga 1994. Dimana dalam operasi ini DEA mengerahkan 100 orang anggotanya dan bekerjasama dengan *Border Patrol Tactical Unit (BORTAC)* / unit patroli perbatasan Amerika Serikat dengan dibantu oleh pasukan militer kesembilan negara di wilayah Amerika Latin (Nixon, 1973). Dalam operasi Snow Cap Operation

tersebut berhasil memusnahkan 2.400 tempat pembuatan koka, 4.400 galon bahan kimia untuk bahan dasar pembuatan kokain telah disita, 7.500 ton daun koka 21.000 ton pasta koka berhasil dimusnahkan, dan juga dapat menangkap lebih dari 1.000 pengedar kokain.

Amerika Serikat bersikeras untuk memperluas partisipasi militer Amerika Serikat dan angkatan bersenjata Bolivia dalam *Snow Cap Operation*. Apabila pemerintah Bolivia tidak meningkatkan agresinya, pemerintah Amerika Serikat akan mengancam akan menghentikan bantuan dari Amerika Serikat ke Bolivia. Maka dari itu karena dorongan dari Amerika Serikat untuk meningkatkan agresinya, pemerintah Bolivia dengan Presiden Hugo Banzer saat itu membuat Kebijakan *Plan Dignidad* yang dilakukan pada tahun 1997, Amerika Serikat memonitor secara langsung kebijakan itu, dengan membangun tiga pangkalan militer di wilayah penghasil utama koka. Dengan tujuan untuk pemberantasan dan penanggulangan kokain,

Dan juga Bolivia melakukan Kebijakan *Law 1008* , dimana kebijakan ini bertujuan pembasmian ladang koka dan menetapkan tiga kategori dalam penanaman koka yaitu pertama ,menanam koka di daerah Yungas seluas 12.000 hektar dilegalkan oleh pemerintah Bolivia, kedua, tanaman koka di daerah Chapere harus di musnahkan namun pemerintah akan memberikan kompensasi kepada para petani di daerah tersebut berupa pengembangan tanaman alternatif lain, dan yang ketiga selain daerah chapere dan Yungas, tanaman koka harus diberantas tanpa adanya kompensasi maupun pengembangan alternatif lainnya (Sagung Uttami Subamia Uttari, 2019).

Ancaman terhadap stabilitas nasional Bolivia yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan Operasi *Blast Furnace* dan Operasi *Snow Cap* tidak menghasilkan pengurangan produksi koka yang signifikan, Amerika Serikat untuk bersikeras bahwa pemerintah Bolivia perlu mengambil tindakan tambahan melalui pembuatan kebijakan domestik yang agresif selain operasi militer yang dilakukan. Mengingat tekanan tersebut, pemerintah Bolivia menerapkan program internal yang bertujuan menghilangkan daun koka sebagai upaya untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap strategi *War on Drugs* di Bolivia. Kebijakan domestik berupa *Law 1008* dan *Plan Dignidad* merupakan dua undang-undang utama yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk asli Bolivia.

Pada saat Evo Morales menjabat sebagai Presiden Bolivia, kebijakan yang dikeluarkan Evo Morales bertolak belakang dengan kebijakan *War On Drugs* , dimana dia mengeluarkan kebijakan yang lebih banyak memberikan respon kepada masyarakat adat, seperti menasionalisasi perusahaan gas dan melegalkan bahkan memperbesar luas lahan pertanian koka, kebijakan-kebijakan tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bolivia, dan juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat asli Bolivia, terutama bagi masyarakat adat Indian Aymara untuk mendapatkan tanaman koka yang menjadi bahan utama adat mereka, karena Itulah hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan Bolivia meregang.

Pada saat masa pemerintahannya terjadi sejumlah isu seperti, tertangkapnya mantan kepala polisi anti narkoba yaitu jendral Rene Sanabria karena menyelundupkan 100 kg kokain ke Amerika Serikat, DEA menuduh orang-orang di pemerintahan Evo Morales menyelundupkan kokain, Maka dari Evo Morales

menganggap bahwa agen DEA melakukan pencemaran nama baik pemerintahannya dan mengecap bahwa DEA adalah alat Amerika Serikat untuk memeras negara-negara yang tidak mau mengikuti kebijakannya (BBC News, 2011).

Bahkan Evo Morales menuduh agen DEA melakukan Spionase politik, dan berkonspirasi memberikan bantuan kelompok anti-pemerintah yang diperintah oleh oposisinya untuk melawan para polisi dan pemerintahannya. Maka dari itu Evo Morales mengeluarkan kebijakan dengan menghentikan dan mengusir agen DEA pada 2009, tidak boleh melakukan tindakan apapun serta melarang DEA untuk melakukan penerbangan di negaranya (Quiroga, 2008). Tak lama setelah itu Evo Morales melakukan tindakan pengusiran terhadap Philip S. Goldberg, Duta Besar Amerika Serikat yang bertugas di Bolivia karena melakukan penentangan kepada Bolivia dengan cara menggagalkan proses nasionalisasi pemerintah Bolivia (Kathryn Ledebur, 2013).

Undang-undang Amerika memuat ketentuan khusus yang dapat mengkriminalisasi aktivitas yang terjadi diluar perbatasan Amerika Serikat. Perdagangan narkoba internasional adalah salah satu tindakan kriminal karena hal tersebut termasuk kedalam usaha kriminal yang tidak menghormati batas negara dan hukum yang berlaku. DEA sebagai institusi yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan narkoba diberikan wewenang untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum asing karena, sindikat penyelundup yang bertanggung jawab atas perdagangan di Amerika Serikat saja. Kehadiran DEA di wilayah Bolivia dilatar belakangi dengan meningkatnya kebutuhan Kokain di wilayah Bolivia. Undang-undang Bolivia sendiri secara spesifik menyebut bahwa negara

tersebut memperbolehkan para petani menanam sekitar 40.000 hektar koka untuk memenuhi kebutuhan tradisional di negara yang merupakan penduduk asli karena adanya pengaruh kebiasaan kuno terhadap penggunaan koka untuk tradisi teh koka. Akan tetapi sejak kedatangan DEA di wilayah Bolivia justru memberikan banyak pelanggaran dan pengaruh buruk bagi masyarakat Bolivia. Maka dari itu penegakan Undang-undang narkoba Amerika yang bersifat eksteritorial hanya bersifat sementara pada tahun 1986 dan 2009 (“Bolivia - Crops”, n.d.).

### **3.2.2 Dampak terhadap Perekonomian Masyarakat**

Penerapan *Law 1008* yaitu kebijakan yang menetapkan tiga kategori dalam penanaman koka yaitu pertama, menanam koka di daerah Yungas seluas 12.000 hektar dilegalkan oleh pemerintah Bolivia, kedua, tanaman koka di daerah Chapere harus dimusnahkan namun pemerintah akan memberikan kompensasi kepada para petani di daerah tersebut berupa pengembangan tanaman alternatif lain, dan yang ketiga selain daerah Chapere dan Yungas, tanaman koka harus diberantas tanpa adanya kompensasi maupun pengembangan alternatif lainnya (Sagung Uttami Subamia Uttari, 2019).

Penerapan kebijakan tersebut menciptakan permasalahan tambahan dalam hal perekonomian masyarakat, yang disebabkan oleh penangkapan pengunjuk rasa. Mengingat pertumbuhan jumlah narapidana, penangkapan agresif menyebabkan kurangnya ruang penjara yang ada di *The prison of San Sebastian* menyebabkan para narapidana mendapatkan perlakuan yang kurang pantas, seperti minimnya pasokan makanan karena ditentukan oleh keadaan perekonomiannya yang menyebabkan kelaparan yang dirasakan para narapidana, minimnya pelayanan

medis dan, para narapidana tidur di lorong dan lantai. Kejadian tersebut konsekuensi dari adanya kebijakan Law 1008, karena sebagian anggota UMOPAR sewena-wena dalam pemberantasan kokain (Santos, 2002).

Pelanggaran HAM tersebut telah menimbulkan kecaman luas terhadap upaya pemberantasan koka di bawah *Law 1008*. *Law 1008* dianggap tidak efektif untuk mengurangi budidaya koka karena hanya berfokus pada pengurangan budidaya koka secara bertahap dan membutuhkan waktu lama untuk bebas dari koka, yang berbanding lurus dengan kerugian ekonomi yang dialami apabila kebijakan tersebut dilanjutkan. Selain itu, laju penurunan jumlah penanaman koka ilegal sebagai konsekuensi dari strategi *War on Drugs* di Bolivia berpengaruh signifikan terhadap nasib dan penderitaan petani koka.

Dalam proses kebijakan *Plan Dignidad*, pemerintah Bolivia lebih berfokus menggunakan unit militer, walaupun dengan cara militer penanaman koka ilegal menurun dari yang awalnya 45.800 pada tahun 1997 menjadi 14.600 hektar pada tahun 2000, namun penurunan tersebut berbanding terbalik dengan keadaan para petani koka, karena kebijakan tersebut telah menurunkan standar hidup para petani koka secara signifikan di daerah Chapere, dan memicu konflik antara pasukan militer dengan petani Chapare yang telah menyebabkan 33 orang petani Chapere tewas, serta 570 orang petani mengalami luka-luka, karena melakukan perlawanan sebagai reaksi atas implementasi *Plan Dignidad* (Sagung Uttami Subamia Uttari, 2019).

Pada saat Evo Morales menjadi presiden, kebijakan yang dikeluarkan bertolak belakang dengan kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat, seperti melakukan

kebijakan *Land Reform*, dimana Evo Morales memberikan lahan pertanian koka sebesar 3,1 hektar kepada 60 untuk para petani miskin di Bolivia, bahkan antara tahun 2000 dan 2009, produksi kokain meningkat lebih dari 100 persen di Bolivia. Selain itu, Bolivia juga mempunyai tingkat penyalahgunaan narkoba dalam negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan Peru. Statistik penyalahgunaan opiat, kokain, ganja, dan obat-obatan jenis amfetamin dua hingga enam kali lebih tinggi di Bolivia dibandingkan di Peru (“Bolivia Cocaine and Other Drug Abuse”, n.d.). Kantor Pengawasan Narkoba PBB memperkirakan bahwa 30.900 hektar koka ditanam di Bolivia pada tahun 2009, menjadikan Bolivia sebagai produsen koka terbesar ketiga setelah Kolombia (68.000 hektar) dan Peru (59.900 hektar). PBB memperkirakan bahwa 35.148 dari 54.608 metrik ton yang diproduksi di Bolivia dijual di pasar tidak resmi yang didominasi oleh perdagangan kokain, sebagian besar dari produksi koka di Chapare. Penjualan daun koka berjumlah sekitar US\$265 juta pada tahun 2009, mewakili 14% dari seluruh penjualan pertanian dan 2% PDB Bolivia. Coca dijual secara legal di pasar grosir di Villa Fátima di la Paz dan Sacaba, Cochabamba (“Bolivia - Crops”, n.d.).

Namun Amerika Serikat ingin menghapuskan tanaman koka dari tanah Bolivia, maka dari itu Amerika Serikat menunjuk DEA untuk menghancurkan ladang koka walaupun penghancuran tersebut dapat menurunkan tanaman koka yang awalnya lahan pertanian tanaman koka 70 ribu hektar turun menjadi 30 ribu hektar, namun penghancuran tersebut menyebabkan para petani tidak mendapatkan pilihan hidup yang layak dan menyebabkan negara Bolivia dilanda kemiskinan yang berkepanjangan (Samsul Ma’arif, 2013). Maka dari itu Evo Morales berupaya

untuk menghentikan intervensi dari Amerika Serikat terkait dengan budaya masyarakat Bolivia.

### **3.3 Konteks Hubungan Internasional**

#### **3.3.1 Hubungan Bolivia dan Amerika Serikat dalam**

##### **Konteks DEA**

Pemerintahan Bolivia, yang dipimpin oleh Presiden Evo Morales, telah membawa banyak perubahan sikap terhadap Amerika Serikat. Pergeseran tersebut terlihat pada tahun 2008, ketika Evo Morales melakukan tindakan pengusiran terhadap Philip S. Goldberg, Duta Besar Amerika Serikat yang bertugas di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bolivia (Kathryn Ledebur, 2013).

Selain mengusir duta besar Amerika Serikat, pemerintah Bolivia menghentikan kerjasama *War on Drugs* dengan Amerika Serikat dengan menutup *Drug Enforcement Administration* (DEA) dari Amerika Serikat pada November 2009 (Patten, 2016). *Drug Enforcement Administration* (DEA) merupakan organisasi yang berupaya memerangi perdagangan narkoba ilegal. Selama lebih dari 30 tahun, DEA telah bekerja sama dengan pemerintah (Thomas Grisaffi, 2021). Maka dari itu pengusiran Duta Besar Goldberg dan penutupan DEA telah merenggangkan hubungan diplomatik antara Bolivia dengan Amerika Serikat.

Meskipun demikian, adanya keregangan antara hubungan Bolivia dan Amerika Serikat, Bolivia masih memiliki hubungan dengan Venezuela dapat dikatakan dekat karena sama-sama pemimpin sayap kiri bahkan pada tahun 2006 Hugo Chavez menawarkan Evo Morales dengan 150 ribu barel solar tiap bulan,

sebagai gantinya Evo Morales akan membayar Venezuela dengan produk pertanian Bolivia (Mustafa, 2014). Pada saat Evo Morales meresmikan pabrik untuk mengelola koka di daerah Yungas, dimana pabrik tersebut didanai oleh Presiden Venezuela bernama Hugo Chavez yang menyediakan 1 juta dollar AS (Samsul Ma'arif, 2013), dengan tujuan untuk menghasilkan produk-produk legal seperti minuman ringan dan teh. Karena pemerintah Venezuela percaya, pengolahan daun koka secara tepat tidak akan membahayakan karena koka bukanlah narkoba.

Sebelum Evo Morales mengusir DEA dari Bolivia, Venezuela terlebih dahulu memberlakukan pengusiran itu. Negara Venezuela telah menjadi jalur utama perdagangan kokain ilegal, dimana perdagangan kokain ilegal tersebut berasal dari Kolombia dan akan diedarkan ke Amerika Serikat dan Eropa (Geoff Ramsey, 2020). Maka dari itu Amerika Serikat menunjuk (DEA) *Drug Enforcement Administration* untuk mengatasi peredaran Kokain Ilegal di Venezuela. Namun dalam prosesnya, DEA justru melakukan spionase dan melanggar kedaulatan di Venezuela, dengan perintah dari Amerika Serikat, maka dari itu karena DEA dinilai merugikan Venezuela, karena perintah dari Presiden Venezuela bernama Hugo Chavez, dia mengusir dan menghentikan kerjasama dengan (DEA) *Drug Enforcement Administration* pada tahun 2005 (Lefebvre, 2014).

Di negara Ekuador pun pemerintahannya menolak adanya campur tangan dari Amerika Serikat, seperti, Presiden Ekuador Rafael Correa memerintahkan untuk diplomat Amerika Serikat bernama Armando Astoraga untuk hengkang dari negaranya pada tahun 2009, karena dinilai terlalu ikut campur dalam urusan dalam negerinya, seperti membekukan bantuan rutin dari Amerika Serikat sebesar \$340 ribu (JPNN.com, 2009). Dan Armando Astoraga menggunakan bantuan tersebut

untuk mencoba mempengaruhi pemimpin unit penegakan obat-obatan terlarang di Ekuador. Maka dari itu Presiden Ekuador tidak akan memperbarui perjanjian tentang mengizinkan pesawat tempur Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya udaranya untuk memantau peredaran obat-obatan terlarang (Wijanarko, 2009).

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America /Bolivarian Alliance for the Peoples of Our Americas (ALBA) berisikan negara-negara Amerika Latin yang bekerjasama untuk bersatu mengurangi hegemoni dari AS

### **3.4 Evo Morales Dan DEA**

Melihat dari kepemimpinan sebelum Evo Morales, kebijakan yang dilakukan antara Pemerintah Bolivia dan Amerika Serikat memberikan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan tak hanya bagi para masyarakat adat, para petani koka saja, namun bagi masyarakat lainnya, seperti terbuatnya UMOPAR oleh DEA yang seharusnya UMOPAR membantu pemerintah Bolivia memerangi kokain, namun dalam kenyataannya UMOPAR justru memberikan banyak dampak negatif, dan melakukan pelanggaran kepada kemanusiaan kepada masyarakat Bolivia, dimana mereka melakukan penganiayaan para penduduk, merampok rumah penduduk saat malam hari dan bahkan melukai serta mencuri milik penduduk.

Pertimbangan-pertimbangan diatas dimana DEA di negara Bolivia memberikan lebih banyak dampak negatif, seperti dari sisi politik domestik Amerika Serikat dengan perantara DEA bekerja sama dengan partai oposisinya untuk memberikan bantuan kelompok anti-pemerintah untuk melawan para polisi dan

pemerintahannya untuk menggulingkan Evo Morales. Dari sisi Militer, adanya DEA justru membuat ketidakseimbangan keamanan karena DEA menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk asli Bolivia, seperti seperti menangkap para penduduk sipil dan membunuh para petani koka. Dari sisi Ekonomi, kebijakan yang dilakukan DEA justru menyebabkan para petani tidak mendapatkan pilihan hidup yang layak dan menyebabkan negara Bolivia dilanda kemiskinan yang berkepanjangan. Dari sisi hubungan internasional, negara lain pun menilai DEA dengan negatif, seperti di negara Venezuela, dimana DEA justru melakukan spionase dan melanggar kedaulatan di Venezuela, maka dari itu Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela akhirnya mengusir DEA dari negaranya.

Negara-negara Amerika membentuk *Organization of American States (OAS)*, dengan bertujuan untuk memperkuat perdamaian, keamanan dan memperkuat perekonomian di Benua Amerika, mereka juga bekerjasama dengan negara Bolivia untuk mempromosikan bagaimana pencegahan penyalahgunaan terhadap narkoba (United Nations, 2005).

Negara Cuba dan Venezuela melakukan kerjasama regional yang bernama *alternativa Bolivariana Para Las America (ALBA)* pada tahun 2004, dan kini berjumlah 11 negara, yaitu Antigua dan Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominika, Ekuador, Grenada, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines dan Venezuela. ALBA bertujuan untuk membuat perubahan di Kawasan Amerika Latin agar mendapatkan keadilan untuk menghilangkan kesenjangan sosial, memperbaiki ekonomi maupun sosial dan mengurangi intervensi AS di negaranya masing-masing (Wahyuni Andike, 2022).

Ada tekanan yang berbeda diantara kebijakan OAS dan ALBA dimana OAS ingin memberantas adanya kokain dan obat-obatan berbahaya di wilayah Amerika, namun sebaliknya negara-negara ALBA yang rata-rata masyarakatnya menggunakan tanaman koka sejak turun temurun dan bahkan dapat menunjang perekonomian negara-negara ALBA , maka dari itu terjadi perbedaan pendapat mengenai koka tersebut.

Dibawah kepemimpinan Evo Morales, dia secara tegas menolak adanya OAS dan AS, karena negara-negara ALBA khususnya Bolivia, masyarakatnya sudah menggunakan tanaman koka secara tradisi sejak ribuan tahun lalu dan tidak dapat terpisahkan bahkan penjualan daun koka berjumlah sekitar US\$265 juta pada tahun 2009, mewakili 14% dari seluruh penjualan pertanian dan 2% PDB Bolivia(“Bolivia - Crops”, n.d.). Maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Akhirnya Evo Morales mengambil keputusan dengan mengusir (DEA) *Drug Enforcement Administration*, karena dengan adanya DEA, justru menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi maupun keamanan nasional yang menyebabkan masyarakat Bolivia mengalami kemiskinan dan kesengsaraan. Dikutip dari akun twitter pribadi Evo Morales, dia memperingatkan kepada masyarakat Bolivia dan komunitas internasional bahwa DEA dan agen politik serta medianya sedang melakukan kebijakan yang bohong dan melakukan ujaran kebencian terhadap para petani koka dengan tujuan untuk memecah belah, bahkan menyebutkan bahwa DEA melakukan cara yang sama dengan Amerika Serikat untuk mengudeta dan menyerang suatu negara untuk menjarah sumber daya alamnya. (teleSUR/BGF, 2022).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Selama berabad-abad tanaman koka sudah digunakan oleh suku asli Indian Aymara untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan pembuatan teh, berbagai bahan masakan makanan, sebagai bahan dalam proses pengobatan, bahkan tanaman koka digunakan untuk acara-acara keagamaan sehingga dapat dipahami bahwa tanaman koka telah menjadi salah satu barang esensial bagi masyarakat adat Bolivia. Seiring berjalannya waktu, saat ini tanaman koka tak hanya menjadi salah satu pemenuh kebutuhan, namun telah menjadi salah satu penunjang perekonomian Bolivia.

Dalam proses pengolahannya, tanaman koka diolah untuk berbagai obat-obatan dan akhirnya tanaman ini menjadi bahan baku dalam pembuatan kokain, karena harga tanaman koka memiliki harga yang sangat bernilai dan cukup tinggi, membuat sebagian besar masyarakat Bolivia berprofesi sebagai petani, hasil tani tersebut adalah daun koka. Bahkan dengan kokain, negara dapat mempekerjakan 2 - 6% total populasi di Bolivia dan membuat perekonomian Bolivia meningkat. Dan menyebabkan negara Bolivia menjadi Negara penghasil Kokain terbesar ketiga di dunia setelah negara Peru dan juga negara Kolombia. Secara tidak langsung tanaman koka berhasil meningkatkan devisa negara dan memperkuat demokrasi dengan meningkatkan pendapatan serta standar hidup masyarakat Bolivia.

Pada awalnya kokain hanya dijadikan obat-obatan namun dalam perkembangannya kokain ternyata memiliki efek yang sangat berbahaya. Maka dari

itu pada tahun 1922, Amerika Serikat secara resmi menetapkan bahwa kokain adalah obat yang berbahaya dan harus diberantas, bahkan Amerika Serikat membuat kebijakan *War on Drugs* dengan tujuan untuk memberantas kokain. Amerika Serikat juga membuat badan anti obat-obatan berbahaya yang dikenal dengan DEA yang ditempatkan di negara-negara yang terkenal penghasil kokain seperti Bolivia.

Namun karena Evo Morales yang berasal dari suku adat Bolivia pernah menjadi petani koka, maka dari itu pada saat terpilihnya Evo Morales menjadi presiden Bolivia, dia membuat kebijakan yang banyak mementingkan kepentingan masyarakat adat dan melindungi tanaman koka, karena Evo Morales ingin terus melestarikan budaya adat leluhurnya. maka dari itu kebijakannya bertolak belakang dengan kebijakan dari Amerika Serikat yang ingin memusnahkan tanaman koka, Dalam prosesnya DEA justru membuat ketidakseimbangan politik, sosial, ekonomi dan militer di Bolivia.

Dalam politik domestiknya, karena kebijakan yang dikeluarkan Evo Morales lebih banyak memberikan respon kepada masyarakat adat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bolivia, serta memberikan keleluasaan bagi masyarakat adat Bolivia untuk mendapatkan tanaman koka yang menjadi bahan utama adat mereka, maka dari itu Evo Morales banyak mendapatkan dukungan dari para penduduk asli Bolivia. Disisi lain, Amerika Serikat merasa terancam karena kepemimpinan Evo Morales bertolak belakang dengan kebijakan *War On Drugs*, maka dari itu DEA diisukan bekerja sama dengan partai oposisinya untuk memberikan bantuan kelompok anti-pemerintah untuk melawan para polisi dan

pemerintahannya untuk menggulingkan Evo Morales, karena dinilai Evo Morales tidak memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat.

Dalam kondisi sosialnya, karena masyarakat Bolivia menjadikan tanaman koka sebagai salah satu kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan keseharian mereka, dan telah menjadi salah satu barang esensial bagi masyarakat adat seperti bahan pengobatan dan acara-acara keagamaan, maka dari itu tidak dapat terpisahkan dengan budaya masyarakat Bolivia. Namun pemanfaatannya pun berkembang menjadi salah satu komoditas yang dapat menunjang ekonomi Bolivia karena dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat Bolivia dan tanaman koka sejauh ini dilihat sangat bernilai dan memiliki pasar yang cukup tinggi. Namun karena adanya kebijakan *War On Drugs* yang dilakukan DEA justru menyebabkan berpengaruh signifikan terhadap penderitaan para petani koka dan masyarakat lainnya, seperti para wanita dan anak-anak mengalami berbagai pelanggaran seperti pelecehan dan juga penyiksaan, sedangkan para pria dibunuh. Maka dari itu masyarakat menanggapi kebijakan DEA tersebut dengan perlawanan.

Bagi perekonomian Bolivia, karena pada saat Evo Morales menjabat sebagai Presiden Bolivia, dia mengeluarkan kebijakan *Land Reform*, dengan memberikan lahan pertanian koka sebesar 3,1 hektar kepada 60 untuk para petani miskin di Bolivia, namun Amerika Serikat ingin menghapuskan tanaman koka dari tanah Bolivia, dan menunjuk DEA untuk menghancurkan ladang koka, dalam penghancuran tersebut menyebabkan para petani tidak mendapatkan pilihan hidup yang layak dan menyebabkan negara Bolivia dilanda kemiskinan yang berkepanjangan. Maka dari itu Evo Morales ingin menghentikan intervensi dari Amerika Serikat terkait dengan budaya masyarakat Bolivia.

Dampak adanya DEA di bidang militer adalah, karena DEA bekerjasama dengan pemerintah Bolivia untuk membentuk UMOPAR (*Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales*) atau dikenal dengan nama tim Leopardos, yang berisikan 300 polisi lokal Bolivia yang anggotanya dipilih dan diseleksi oleh agen DEA dari para polisi yang paling terampil di Bolivia, dan akan diberikan pelatihan khusus dari DEA seperti taktik taktik penyergapan dan operasi militer, dengan tujuan untuk membantu dalam proses pemberantasan kokain, namun dalam prosesnya justru menyebabkan penderitaan bagi para petani dan masyarakat Bolivia, karena dalam proses pemusnahan tersebut menyebabkan pelanggaran kemanusiaan kepada masyarakat seperti disiksa, dilecehkan bahkan petani koka dibunuh oleh para militer.

Dalam konteks Internasional, tak hanya Evo Morales sebagai presiden Bolivia saja yang mengambil tindakan tegas dengan mengusir Duta Besar Amerika Serikat dan agen DEA tersebut pada tahun 2009, karena Evo Morales ingin Amerika Serikat tidak ikut campur dalam dengan budaya masyarakat Bolivia. Negara lain pun merasakan bahwa DEA memberikan pengaruh negatif, seperti di Venezuela dan Ekuador, Venezuela menjadi salah satu negara yang bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk melakukan kebijakan *War On Drugs*, karena negara Venezuela menjadi jalur utama perdagangan kokain illegal, dimana perdagangan kokain illegal tersebut berasal dari Kolombia dan akan di edarkan ke Amerika Serikat dan Eropa, maka dari itu Amerika Serikat menunjuk DEA untuk mengatasi perdagangan kokain tersebut, namun dalam prosesnya DEA justru melakukan spionase dan melanggar kedaulatan di Venezuela, maka dari itu Hugo Chavez

sebagai presiden Venezuela akhirnya mengambil tindakan tegas dengan mengusir DEA dari negaranya pada tahun 2005.

Ekuador pun memerintahkan diplomat Amerika Serikat bernama Armando Astoraga untuk hengkang dari negaranya pada tahun 2009, karena menggunakan dana bantuan rutin dari Amerika Serikat sebesar \$340 ribu untuk mempengaruhi pemimpin unit penegakan obat-obatan terlarang di Ekuador, dan terlalu ikut campur urusan dalam negeri Ekuador. Maka dari itu baik Bolivia, Venezuela dan Ekuador melihat adanya DEA di negaranya, justru memberikan dampak negatif, maka dari itu masing masing-masing negara melakukan cara untuk mengurangi campur tangan Amerika Serikat di negaranya.

Melihat dari pertimbangan-pertimbangan diatas dimana DEA ini lebih banyak memberikan dampak negatif bagi Bolivia dan pemerintahan Evo Morales, seperti menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi maupun keamanan nasional yang menyebabkan masyarakat Bolivia mengalami kemiskinan dan kesengsaraan. akhirnya Evo Morales sebagai presiden Bolivia mengambil keputusan yang sama dengan Hugo Banzer yaitu presiden Venezuela, dengan mengusir agen DEA di Bolivia pada tahun 2009. Karena dinilai DEA sebagai alat intervensi Amerika Serikat dan terlalu ikut campur mengurus urusan dalam negeri Bolivia.

## **4.2 Rekomendasi**

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, baik secara penulisan maupun analisis yang mungkin masih dapat disempurnakan oleh peneliti lainnya. Penelitian ini secara spesifik membahas mengapa *Drug Enforcement Administration* diusir pada tahun 2009 saat kepemimpinan Evo

Morales. Pengusiran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti politik domestik, faktor ekonomi, militer, dan konteks hubungan internasional. Sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang mungkin akan membahas bagaimana Bolivia mengurangi hegemoni Amerika Serikat pada saat kepemimpinan Evo Morales. Karena dengan pengusiran *Drugs Enforcement Administration* tersebut, salah satu cara Evo Morales mengurangi hegemoni Amerika Serikat di Bolivia karena justru dinilai merugikan tak hanya Bolivia namun pemerintahan Evo Morales.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, Muhaimin Z. 2020. *KERUNTUHAN REZIM EVO MORALES DI BOLIVIA*. Vol. Volume 5, No.1, November 2020 (153-172)  
doi:10.24198/intermestic.v5n1.9.
- Adi P. Suwecawangsa, Sagung Uttami Subamia Uttari I. 2019. *Respon Masyarakat Adat Bolivia terhadap Kebijakan War on Drugs Amerika Serikat di Bolivia*.
- Ahmed, Jesmine. n.d. "Journal of Critical Reviews." *THE THEORETICAL SIGNIFICANCE OF FOREIGN POLICY IN INTERNATIONAL RELATIONS- AN ANALYSES* Vol 7, Issue 2, 2020:787 - 792.
- Barr, Robert R. 2005. "Latin American Politics and Society." *Bolivia: Another Uncompleted Revolution* Vol. 47, No. 3 (Autumn, 2005), pp. 69-90 (22 pages).  
<https://www.jstor.org/stable/4490418>.
- Benjamin H. Kohl, Linda C. Farthing, . 2014. *Evo's Bolivia: Continuity and Change*. N.p.: University of Texas Press, 2014.
- "Bolivia Perluas Luas Lahan yang Boleh Ditanami Koka." 2017. VOA Indonesia.  
<https://www.voaindonesia.com/a/bolivia-lahan-tanaman-coca/3756636.html>.
- "Bolivia's Evo Morales says no to DEA agents' return." 2011. BBC.  
<https://www.bbc.com/news/world-latin-america-12643404>.

Camarena, Dora. n.d. "The Drug Enforcement Administration." DEA.gov. Accessed August 16, 2023. [https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-04/1985-1990\\_p\\_58-67.pdf](https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-04/1985-1990_p_58-67.pdf).

Carlos A. Pérez Ricart. n.d. "Source: Global Governance." *The Role of the DEA in the Emergence of the Field of Anti-narcotics Policing in Latin America* Vol. 24, No. 2 (Apr.-June 2018), pp. 169-191.

Choplin, William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: CV Sinar Bandung.

Coletta A. Youngers, Kathryn Ledebur a. n.d. *From Conflict to Collaboration: An Innovative Approach to Reducing Coca Cultivation in Bolivia* *Stability*, 2(1): 9, pp. 1-11, DOI: <http://dx.doi.org/10.5334/sta.aw>.

Daniel Patten. 2016. "Social Justice." *The Mass Incarceration of Nations and the Global War on Drugs: Comparing the United States' Domestic and Foreign Drug Policies* Vol. 43, No. 1 (143) (2016), pp. 85-105 (21 pages).

"The Drug Enforcement Administration." n.d. DEA.gov. Accessed August 16, 2023. [https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-04/1970-1975\\_p\\_30-39\\_0.pdf](https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-04/1970-1975_p_30-39_0.pdf).

"Ekuador Usir Diplomat AS." 2009. JPNN.com. <https://www.jpnn.com/news/ekuator-usir-diplomat-as>.

"Ekuador Usir Diplomat Kedua Amerika Serikat - Dunia Tempo.co." 2009. Dunia. <https://dunia.tempo.co/read/160997/ekuator-usir-diplomat-kedua-amerika-serikat>.

“Evo Morales, Dibenci dan Dicintai di Bolivia.” 2014. CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141014110500-134-6257/evo-morales-dibenci-dan-dicintai-di-bolivia>.

Healy, Kevin. 1998. “British Journal of Addiction.” *Bolivia and Cocaine: a developingcountry's dilemmas* 83, 19-23.

Healy, Kevin. n.d. “Source: Journal of Interamerican Studies and World Affairs,.” *Political Ascent of Bolivia's Peasant Coca Leaf Producers* ol. 33, No. 1 (Spring, 1991), pp. 87-121.

Herbert A. Simon. n.d. *Administrative behavior : A Study Of Decision Making Processes in Administrative Organization*.

History.com. 2017. War on Drugs - Timeline in America, Definition & Facts. <https://www.history.com/topics/crime/the-war-on-drugs>.

Idjang Tjarsono, Samsul Ma'arif ,. 2013. *KERJASAMA BILATERAL AMERIKA SERIKAT DENGAN BOLIVIA DALAM PEMBERANTASAN KOKAIN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN EVO MORALES (TAHUN 2006 - 2010)*.

Isikoff, Michael. 1989. “DEA IN BOLIVIA 'GUERRILLA WARFARE.’” The Washington Post.

<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/01/16/dea-in-bolivia-guerrilla-warfare/0271b16a-855a-41de-aea0-75682540c8bb/>.

Jaime Malamud-Goti. 1990. “American University International Law Review.” *Soldiers, Peasants, Politicians and the War on Drugs in Bolivia* 6, no. 1 (1990): 35-55.

Jeremy David Joslin, Amy Sue Biondich ,. 2016. "Review Article Coca: The History and Medical Significance of an Ancient Andean Tradition." *Coca: The History and Medical Significance of an Ancient Andean Tradition*.

Kathryn Ledebur , Maritza Paredes , Alvaro Pastor, Thomas Grisaffi L. n.d. "World Development." *From criminals to citizens: The applicability of Bolivia's community- based coca control policy to Peru* Volume 146, October 2021, 105610.

Koops, Megan. n.d. *The Divide of the Coca Leaf: National Culture and the Drug Policies of Bolivia and the United States* Policies of Bolivia and the United States Vol. 5: Iss. 1, Article 3.

Lefebvre, Stephan. 2014. "Remember When Venezuela and Bolivia Kicked the U.S. DEA Out of Their Countries, Accusing It of Espionage? Looks Like They Were Right..." Center for Economic and Policy Research -. <https://cepr.net/remember-when-venezuela-and-bolivia-kicked-the-us-dea-out-of-their-countries-accusing-it-of-espionage-looks-like-they-were-right/>.

Lehoucq, Fabrice. n.d. "Journal of Democracy,." *Bolivia's Citizen Revolt* volume 31, Number 3, July 2020, pp. 130-144 (Article).

Mitchell, Matthew. 2010. *Not Your Father's Coast Guard: The Untold Story of U.S. Coast Guard Special Forces*. Bloomington: AuthorHouse.

Morales, Waltraud Q. n.d. "Source: Third World Quarterly." *Militarising the Drug War in Bolivia* ol. 13, No. 2 (1992), pp. 353-370.

- Mukhsin, Andi A. 2013. "Skripsi Hubungan Internasional." *Kebijakan nasionalisme minyak dan gas serta legalisasi koka di Bolivia dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat periode 2005-2009*.
- Musthafa, Wahid. 2016. *EVO MORALES DAN PEMBENDUNGAN PENGARUH AMERIKA SERIKAT DI BOLIVIA*.
- Natariandi, Angga. 2009. *Perubahan Politik dan Gerakan Sosial di Bolivia (Analisa Keberhasilan Gerakan Sosial dalam Menentang Privatisasi Air dan Hidrokarbon serta Pembasmian Koka di Bolivia Tahun 1985- 2006)*.
- Patten, Daniel. 2016. "Source: Social Justice." *The Mass Incarceration of Nations and the Global War on Drugs: Comparing the United States' Domestic and Foreign Drug Policies* Vol. 43, No. 1 (143) (2016), pp. 85-105.
- "PBB: Tanaman Koka di Bolivia Berkurang Pada 2012 - ANTARA News Sumatera Barat - Berita Terkini Padang, Sumatera Barat." 2013. Antara Sumbar. <https://sumbar.antaranews.com/berita/53673/pbb-tanaman-koka-di-bolivia-berkurang-pada-2012>.
- Phan-Gruber, Emily. 2010. "The Journal of Civil Society and Social Transformation." *The Role of Alternative Development in the "War on Drugs": The Case of Bolivia* Volume 1.
- Quiroga, Carlos. 2008. "Bolivia's Morales bars 'spying' US DEA agents." Reuters. <https://www.reuters.com/article/idUSN01440002>.

Rafdi. 2014. *Jom FISIP Volume 1 No.2-Oktober 2014 1 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUSIRAN UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DI BOLIVIA.*

“Rakyat Bolivia Dbolehkan Mengunyah Daun Koka.” 2013. Berdikari Online. <https://www.berdikarionline.com/rakyat-bolivia-dbolehkan-mengunyah-daun-koka/>.

Ramsey, Geoff, David Smilde, and Nicolás Maduro. 2020. “BEYOND THE NARCOSTATE NARRATIVE.” WOLA. <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2021/05/Narcostate-memo-final.pdf>.

Raymond Samuel. n.d. “Kisah Sukses Bolivia Memerangi Narkoba.” Berdikari Online. Accessed August 16, 2023. <https://www.berdikarionline.com/kisah-bolivia-memerangi-narkoba/>.

Ricardo Godoy, Mario De Franco ., n.d. “Journal of Latin American Studies.” *The Economic Consequences of Cocaine Production in Bolivia: Historical, Local, and Macroeconomic Perspectives* Vol. 24, No. 2 (May, 1992), pp. 375-406 (32 pages). <https://www.jstor.org/stable/157071>.

Santos, Solimar. n.d. “Source: The University of Miami Inter-American Law Review , Spring, 2002,.” *Unintended Consequences of United States' Foreign Drug Policy in Bolivia* Vol. 33, No. 1 (Spring, 2002), pp. 127-151.

Tegel, Simeon. 2016. “Bolivia ended its drug war by kicking out the DEA and legalizing coca.” VICE. <https://www.vice.com/en/article/pa49jn/bolivia-ended-its-drug-war-by-kicking-out-the-dea-and-legalizing-coca>.

“Teman-teman Anti-Amerika Morales.” 2014. CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141014151801-134-6338/teman-teman-anti-amerika-morales>.

Thiago Rodrigues, Beatriz Caiuby Labate C., ed. 2016. *Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas*. N.p.: Springer Nature.

Tyas, Ratna H. n.d. *Analisis Faktor Pendorong Pemerintah Bolivia dibawah Otoritas Presiden Evo Morales dalam Menghentikan Hubungan Kerjasama dengan USAID (2013)*.

Volkov, Rahim. 2022. “Bolivia: Evo Morales Warns of DEA-driven Destabilisation Plan.” teleSUR English.

<https://www.telesurenglish.net/news/Bolivia-Evo-Morales-Warns-of-DEA-driven-Destabilisation-Plan-20220212-0008.html>.

WILL REISINGER. 2009. “CALIFORNIA WESTERN INTERNATIONAL LAW JOURNAL.” *THE UNINTENDED REVOLUTION: U.S. ANTI-DRUG POLICY AND THE SOCIALIST MOVEMENT IN BOLIVIA* Vol. 39: No. 2, Article 2.

Wolff, Jonas. n.d. “Journal of Latin American Studies.” *Reviewed Work: The New Democracy Wars: The Politics of North American Democracy Promotion in the Americas by Neil A. Burron* Vol. 46, No. 2 (May 2014), pp. 384-386 (3 pages).